

ETNOVISI

Jurnal Antropologi Sosial Budaya
Vol. II • No. 1 • April 2006
ISSN: 0216-843x

Pemimpin Redaksi

Zulkifli B. Lubis

Wakil Pemimpin Redaksi

Sri Alem Sembiring

Sekretaris Redaksi

Nurdiani Nasution

Dewan Redaksi

Agustrisno, Ermansyah, Fikarwin Zuska,
Lister Berutu, R. Hamdani Harahap, Rytha Tambunan, Sri
Emiyanti, Tjut Sahriani, Yance, Zulkifli.

Penelaah Ahli

Usman Pelly (Universitas Negeri Medan)
Chalida Fakhruddin (Universitas Sumatera Utara)
Iwan Tjitradjaja (Universitas Indonesia)
Irwan Abdullah (Universitas Gadjah Mada)
John McCarthy (The Australian National University, Australia)

Tata Usaha

Sabariah Bangun
Edi Saputra Siregar

Sirkulasi

Irfan Simatupang (Koordinator)

Keuangan

Mariana Makmur

Etnovisi Online

Nurman Ahmad

Penerbit

Laboratorium Pengembangan Masyarakat (LPM-ANTROP)
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
USU

Alamat Redaksi:

Jl. Dr. A. Sofyan No.1 Kampus USU, Padang Bulan,
Medan 20155
Telp./Fax.: (061) 8223605.
E-mail: lpm_antrop@telkom.net

Jurnal ETNOVISI didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran di bidang antropologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Ia hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOVISI yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' sebagai namanya, juga mengemban misi untuk mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat madani.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian maupun etnografi, dan tulisan-tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk penyelesaian masalah-masalah sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan akan disunting redaksi. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata. Catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOVISI terbit tiga kali dalam setahun.

Daftar Isi

Kata Sambutan Prof. Dr. Meutia F. Hatta (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia) pada Sarasehan Nasional Jaringan Keperabatan Antropologi Indonesia, Medan, 20 – 26 Februari 2006	1 – 2
Membumikan Multikulturalisme di Indonesia <i>Achmad Fedyani Syaifuddin</i>	3 – 11
Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan <i>Irwan Abdullah</i>	12 – 21
Multikulturalisme dalam Politik: Sebuah Pengantar Diskusi <i>Nur A. Fadhil Lubis</i>	22 – 31
Multikulturalisme dalam Bidang Sosial <i>Ahmad Rivai Harahap</i>	32 – 35
Pendidikan Multikulturalisme : Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa <i>Sofyan Tan</i>	36 – 39
Multikulturalisme: Dari Lingkup Keluarga Hingga Media Massa <i>Robert Valentino Tarigan</i>	40 – 42

Keterangan gambar pada halaman muka:

Gambar 1.

Doa bersama umat Buddha bertajuk "sejuta pelita sejuta harapan" diselenggarakan di Lapangan Merdeka, Medan. Acara yang juga salah satunya menghidupkan sekitar 20 ribu pelita ini dihadiri oleh umat Buddha dari beragam etnis yang ada di Medan dan kota-kota sekitarnya. Foto: Putra Perwira Lubis.

Gambar 2.

Satu sekuen dalam Upacara *Sipaha Lima* yang diselenggarakan oleh pemeluk *Ugamo Malim* di Desa Hutatinggi, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, tahun 2004. Foto: Putra Perwira Lubis.

Gambar 3

Sekuen acara "trivulla" (tusuk lidah) dalam Upacara *Pangni Uteram* pada komunitas Tamil di Medan. Acara seperti ini biasanya dilakukan sebagai bentuk tolak bala dan membayar nazar atas keselamatan dari bencana. Foto diambil pada upacara yang dilakukan di Jl. Karya, Sei Agul, Medan, tahun 2004. Foto: Putra Perwira Lubis.

Kata Pengantar

Waktu setahun memang tak terasa panjang. Tiga kali sudah Jurnal ETNOVISI hadir ke hadapan pembaca, mulai dari Volume 1 No.1 hingga No. 3, dengan segala keterbatasan dan kendala yang senantiasa menemani perjalanannya. Tetapi tekad dan janji adalah amanah, dan obor harapan untuk menuju visi yang digariskan tetap dinyalakan. Kami mengemban misi dengan prinsip “akan tetap lebih baik menyalakan lilin kecil dalam pekatnya kegelapan ketimbang terus menerus mengutuk kegelapan itu sendiri”. Atas dasar keteguhan pada prinsip itulah alhamdulillah kami bisa kembali hadir ke hadapan pembaca melalui edisi keempat ini.

Adalah kumpulan makalah pada sebuah perhelatan Jaringan Kekerabatan Mahasiswa Antropologi (JKAI) se-Indonesia yang digelar di Fisip USU pada 20 – 26 Februari 2006 lalu yang menjadi bahan tulisan yang dihadirkan dalam edisi ini. Perhelatan yang bernama Sarasehan dan Seminar Nasional VIII JKAI itu mengusung tema besar “Menata Kehidupan Masyarakat Majemuk Berbasis Multikulturalisme” dan menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi. Tema itu memang relevan untuk terus digaungkan sebagai wujud kesadaran dan komitmen kita membangun tatanan kehidupan bangsa yang berkeadilan, berkeadaban menuju masyarakat madani. Para pendiri bangsa kita sesungguhnya sudah menorehkan asas multikulturalisme itu dalam motto “Bhinneka Tunggal Ika”, meskipun kita ketahui, beragam tafsir dan implementasinya telah pula mewarnai rona sejarah perjalanan bangsa ini.

Sebagian dari makalah dalam sarasehan dan seminar nasional tersebut kami muat dalam edisi ini, dan sebagian lainnya kami cadangkan untuk penerbitan edisi kelima nanti. Di bagian awal kami letakkan catatan pembuka dari Prof.Dr. Meutia F. Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan multikulturalisme dipandang sebagai suatu strategi budaya dalam program pemberdayaan perempuan, dan antropolog dapat berperan sebagai *agent of change* melakukan proses pendidikan kepada masyarakat untuk mencapai masyarakat multikultural. Berikutnya adalah tulisan Dr. Ahmad Fedyani Saifuddin, antropolog dari Universitas Indonesia, yang mencoba menguraikan model-model multikulturalisme dan bagaimana konsep ini bisa dibumikan di Indonesia.

Di masa orde baru perbedaan kebudayaan dipandang sebagai suatu hal yang tidak selaras dengan program pembangunan, dan karena itu pula pernah digaungkan apa yang secara luas dikenal dengan “asas tunggal”. Kebijakan kebudayaan pada masa itu cenderung ke arah homogenisasi. Dengan multikulturalisme justru diyakini bahwa ragam perbedaan kebudayaan adalah potensi positif, dan ia merupakan sumber daya sosial yang sangat signifikan didayagunakan untuk pembangunan. Itulah kurang lebih gagasan yang diusung oleh Prof. Dr.Irwan Abdullah, antropolog muda dari UGM, yang dimuat sebagai artikel ketiga dalam edisi ini.

Memang paham multikulturalisme harus dibentengi dari paham sempit yang bernuansa *ethnic revivalism*, yang juga beberapa tahun ini kita lihat mencuat di beberapa daerah seiring dengan proses desentralisasi. Meningkatnya kecenderungan *ethnic revivalism* dapat disebabkan karena menguatnya persepsi tentang ancaman gelombang pasang budaya asing dan tekanan etnik “luar”. Homogenisasi budaya juga sedang terjadi secara global melalui media massa dan media maya (internet). Prof.Dr. Nur A. Fadhil Lubis, Guru Besar IAIN Sumut, dalam tulisannya mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam proses dinamika ini harus dipandang sebagai kawasan interaksi, interpretasi dan pertukaran kultural yang berlangsung terus menerus dan multi-arah dengan intensitas yang tidak sama, dan di sana-sini ada tarikan dan tekanan. Satu hal yang perlu dicermati menurut beliau adalah masih kuatnya patrimonialisme dan kebijakan sentralistik dan hegemoni kekuasaan yang cenderung menyuburkan etnosentrisme dan mengkerdilkan multikulturalisme.

Tiga tulisan berikutnya lebih memfokuskan bahasan pada aspek praktis dari konsep multikulturalisme itu, sebagaimana ia dijalankan dalam ragam bidang kehidupan. Tiga penulis yang dihadirkan di sini masing-masing adalah Ahmad Rivai Harahap, sebagai Sekretaris dari Forum Komunikasi Pemuka Antar -agama (FKPA) Sumatera Utara; Sofyan Tan, pendiri Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda; dan Robert Valentino Tarigan, pendiri BS/BT Bima dan aktivis LSM. Ahmad Rivai Harahap memfokuskan tulisannya pada gagasan bagaimana multikulturalisme sebagai bentuk penataan kehidupan sosial pada masyarakat majemuk dilakukan pada ruang-ruang publik, ruang privat dan antar-ruang privat dalam kerangka bangunan sosial Indonesia. Sementara itu, Sofyan Tan menguraikan pengalamannya “membangkitkan” konsep multikulturalisme tersebut melalui pendidikan multikultural yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) yang didirikannya di Medan. Pada bagian akhir Robert Valentino Tarigan menguraikan pentingnya peranan keluarga sebagai medium utama mewujudkan prinsip-prinsip multikulturalisme, juga pentingnya peranan media massa untuk konteks sosial yang lebih luas.

Demikianlah sederet gagasan dan pemikiran tentang paham dan praksis multikulturalisme itu kami coba tampilkan untuk khalayak pembaca yang budiman. Memahami konsepnya, melihat kemasalahannya dalam menata kehidupan sosial yang majemuk, dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari adalah serangkaian langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya. Semoga kita secara pribadi, secara kelompok (etnis, agama, komunitas, dsb.) dan sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan bangsa ini sudi menjadi duta-duta yang berkomitmen untuk menyebarluaskan gagasan ini kepada khalayak. Akhir kata, selamat membaca dan mengkritisi.

Redaksi

Kata Sambutan

Prof. Dr. Meutia F. Hatta

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

*Keynote Speaker pada Sarasehan Nasional
Jaringan Keperabatan Antropologi Indonesia
Medan, 20 – 26 Februari 2006*

Negara kita menganut multikulturalisme yang tercermin dalam simbol yang telah disepakati bersama, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu pengakuan terhadap heterogenitas etnik, budaya, agama, ras, dan gender, namun menuntut adanya persatuan dalam komitmen politik membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol yang seharusnya dapat difungsikan sebagai roh penggerak perilaku masyarakat Indonesia, di dalam kenyataan belum secara sungguh-sungguh dijadikan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan pada beberapa tempat, kemajemukan masih dianggap sebagai sumber permasalahan bahkan konflik, yang membuktikan bahwa realitas heterogenitas belum dipahami dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan bersama apabila kita mengakui realitas heterogenitas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, peran serta masyarakat memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong agar kemajemukan di Indonesia dapat tampil sebagai suatu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu kelompok masyarakat dapat berperan penting dalam mewujudkan Indonesia ke depan yang lebih baik adalah kelompok perempuan. Dengan jumlah yang cukup besar (49,86%, menurut Sensus penduduk tahun 2000), kaum perempuan sebagai pendidik dalam keluarga dan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang handal menuju masyarakat Indonesia yang egaliter berlandaskan pada semangat multikultural.

Di berbagai wilayah ditemukan berbagai kearifan dan praktik budaya lokal yang positif di mana kaum perempuan banyak berperan, misalnya, peran kaum perempuan dalam pembuatan jamu dalam sistem medis tradisional telah terbukti bermanfaat untuk menjaga kesehatan masyarakat setempat bahkan juga sampai keluar daerah dan luar negeri. Keberagaman potensi lokal dalam sistem medis pada beberapa kebudayaan merupakan perwujudan multikulturalisme yang dapat menjadi kekuatan bangsa dan negara. Adanya keterkaitan yang kuat antara pembangunan pemberdayaan perempuan dengan multikulturalisme membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan sangat menyambut baik gagasan diselenggarakannya Sarasehan.

Visi program pemberdayaan perempuan: yakni “mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai visi di atas disusun 6 misi yang harus dilakukan sebagai berikut; (1) meningkatkan kualitas hidup perempuan, (2) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, (3) menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, (4) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, (5) meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarus-utamaan gender, dan (6) meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai salah satu program pemberdayaan perempuan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila terjadi perubahan pola pikir yang dapat membongkar

hegemoni ideologi patriarki menuju pola pikir yang egaliter, setara dan adil berdasarkan gender. Untuk itu dibutuhkan adanya strategi kebudayaan yang mampu menumbuhkan kesadaran budaya. Suatu kesadaran akan hadirnya berbagai perbedaan kebudayaan kesatuan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Suatu kesadaran yang mengakui laki-laki dan perempuan memang berbeda secara biologis, tetapi tidak boleh dibeda-bedakan hak dan kewajibannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran budaya untuk membangun masyarakat egaliter, yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Dalam konteks inilah, pendidikan multikultural dapat disebutkan sebagai salah satu strategi penting dalam program pemberdayaan perempuan.

Mahasiswa-mahasiswa antropologi yang tersebar di penjuru wilayah Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis untuk mensosialisasikan nilai-nilai multikultural sebagai dasar menata masyarakat yang majemuk. Melalui kegiatan kajian maupun pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan banyak hal yang memungkinkan nilai-nilai yang terkandung dalam kemajemukan Indonesia dapat dikaji dan disebarluaskan. Dalam hal ini, mahasiswa antropologi dapat bertindak selaku *agent of change* yang melakukan proses pendidikan kepada masyarakat untuk mencapai masyarakat multikultural. Apabila multikulturalisme melembaga dan tersosialisasi secara meluas di Indonesia, maka nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Dengan pendidikan multikultural, maka kesetaraan dan keadilan gender akan menjadi suatu kebutuhan bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan berbasis gender adalah pembangunan yang memperhatikan laki-laki dan perempuan serta melibatkan laki-laki dan

perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan.

Para mahasiswa antropologi yang kelak akan berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan: ekonomi, pendidikan, politik, media massa, perfilman dan lain-lain, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya percepatan terwujudnya pembangunan berbasis multikulturalisme adalah bagian dari strategi kebudayaan yang handal untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia.

Mahasiswa antropologi maupun jurusan antropologi yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi pelopor penanaman nilai-nilai multikulturalisme, antara lain dengan mendorong terbentuknya watak dan karakter mahasiswa yang tangguh untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Mendorong kepedulian, cinta, hormat, serta memelihara tanah air dan sesama anak bangsa. Menghargai perbedaan, kebersamaan dan kerja sama (mutualitas) dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup, sekali lagi saya sampaikan harapan yang sangat besar kepada para mahasiswa antropologi agar dapat segera merespons dan mensosialisasikan realitas kemajemukan dan pendidikan multikultural dalam masyarakat Indonesia, antara lain dengan: (1) meningkatkan pemahaman serta mensosialisasikan komitmen multikultural yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai metode dan strategi, (2) menjadi pendidik dan pembimbing masyarakat dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai positif seperti kesetaraan, kebersamaan, kepedulian kepada sesama manusia, cinta tanah air, dan lain-lain, serta (3) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dapat mendorong praktik-praktik peningkatan gotong-royong, kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak.

MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Achmad Fedyani Syaifuddin

Departemen Antropologi Universitas Indonesia

Abstract

This article tries to discuss the types of multiculturalism that may appropriately adjust in Indonesia reality. Multiculturalism was viewed as a good alternative to solve the new complicated problems that happens in Indonesia to maintain national integration by now and in the future. The author discusses the abstract concepts and strategies about multiculturalism to become something more concrete and able to be implemented in daily life.

The author discusses these issues largely by connecting the concept of multiculturalism with the concept of complexity of civilization and culture in Indonesia, nation-state concept, and the global trends, and also with religious conflict. One of the main discourses presented here is the author suggestion to pay closed attention the important of long term strategy of multicultural education, even though this concept have variety explanation.

Keywords: *plural society, multiculturalism, nation-state, nationalism, national policy*

Isu-isu politik kebudayaan mengemuka dan berkembang cepat semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Setelah isu demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pelimpahan sebagian kekuasaan pusat ke daerah-daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah mulai tahun 1999, isu multikulturalisme muncul pada tahun 2002 sebagai alternatif yang kuat untuk menjadi perekat baru kesatuan bangsa. Isu multikulturalisme muncul sebagai akibat dari kesadaran bahwa kesatuan bangsa dan integrasi nasional yang selama ini dipelihara berdasarkan politik kebudayaan seragam dianggap semakin kurang relevan dengan kondisi dan semangat otonomi daerah (desentralisasi) dan kedaerahan turut meningkat sejalan dengan reformasi politik tersebut.

Desentralisasi kekuasaan sebagai keputusan politik nasional ternyata kemudian disadari menimbulkan efek yang kontra produktif apabila dilihat dari perspektif kesatuan dan integrasi nasional suatu bangsa

besar yang isinya luar biasa beranekaragam suku bangsa, agama, kemampuan ekonomi, dan bahkan ras yang tersebar dalam wilayah geografi yang sangat luas. Kontras-kontras kondisi atribut-atribut ini menjadikan semakin rumit terlebih jika isu mayoritas-minoritas, dan dominan-tidak dominan dimasukkan ke dalam wilayah analisa ini. Kalau di masa lalu, kekuatan pengikat keanekaragaman itu adalah politik sentralisasi yang berpusat pada kekuasaan pemerintah yang otoritarian, maka dalam suasana desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah kekuatan pengikat otoritarian tersebut didekonstruksi dan harus digantikan oleh suatu pengikat baru yang relevan. Kemudian multikulturalisme dipandang sebagai alternatif yang tepat untuk menghadapi kerumitan baru yang terjadi, untuk tetap memelihara kesatuan dan integrasi nasional masa kini dan mendatang.

Namun, suatu pertanyaan besar muncul, apakah model multikulturalisme yang kini berlaku di negara-negara lain sesuai dan

dapat diterapkan di Indonesia? Jika tidak, model multikulturalisme apa yang sesuai? Hingga saat ini, pembicaraan tentang multikulturalisme di Indonesia belum selesai. Kebanyakan penulis tentang multikulturalisme di Indonesia lebih memusatkan perhatian pada tujuan daripada proses untuk mencapainya. Mereka menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan sebagainya yang lebih merupakan isu falsafah humanistik-individual daripada sosial-kolektif, padahal suatu model adalah berbicara tentang konsep-konsep dan strategi-strategi untuk mewujudkan konsep-konsep yang abstrak itu menjadi tindakan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, model multikulturalisme sendiri tidak tunggal karena realitas keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan di dunia masing-masing mengandung potensi bagi membangun model unik atau spesifik.

Baiklah saya mulai uraian ini dengan membicarakan lebih dahulu definisi dan model-model multikulturalisme yang ada saat ini, kemudian mencoba menjalinnya dengan kepentingan bangsa kita. Dalam upaya membangun hubungan konsep multikulturalisme itu, saya akan mengkaitkan konsep ini dengan konsep-konsep berikut: kemajemukan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, Negara-bangsa dan perubahan global, konflik-konflik khususnya dalam konteks keagamaan, dan kemudian kembali ke konteks pembahasan kita dengan multikulturalisme dan kemungkinan membumikan konsep ini dalam realitas Indonesia.

Masyarakat Majemuk dan Multikulturalisme

Masyarakat Majemuk

Konsep masyarakat majemuk atau masyarakat plural seringkali dibicarakan bersama-sama dengan konsep masyarakat multikultural, karena keduanya sama-sama menggambarkan keanekaragaman sosial dan kebudayaan. Akan tetapi, apabila istilah plural dan multikultural ini ditambahi imbuhan isme maka pengertian keduanya akan berbeda.

Pluralisme berarti pemahaman atau cara pandang keanekaragaman yang menekankan entitas perbedaan setiap masyarakat satu sama lain dan kurang memperhatikan interaksinya, sedangkan multikulturalisme adalah pemahaman dan cara pandang yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara. Dari konsep multikulturalisme inilah kemudian muncul gagasan normatif mengenai kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan dan hak-hak masing-masing kebudayaan penyusun suatu bangsa.

Paradoks masyarakat majemuk memasuki dunia antropologi melalui diskusi J.S. Furnivall (1948) mengenai kebijakan dan praktik kolonial di Indonesia dan Burma. Ia menguraikan masyarakat majemuk sebagai masyarakat di mana orang-orang yang secara rasial berbeda hanya bertemu di pasar-pasar, suatu gambaran mengenai politik ekonomi kolonial. Kebudayaan-kebudayaan penyusun masyarakat majemuk dilihat sebagai entitas otonom, *distinktif*, yang berbeda satu sama lain. Batas-batas antara kebudayaan-kebudayaan satu sama lain tegas, dan interaksi di antaranya minimal kecuali dalam arena pasar atau arena publik lainnya yang memungkinkan orang bertemu karena kepentingan tertentu. Furnivall mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah "... kumpulan orang ... mereka bergaul tapi tidak bercampur. Setiap kelompok memegang agama mereka sendiri, kebudayaan dan bahasa sendiri, gagasan dan cara hidup sendiri. Sebagai individu-individu mereka bertemu satu sama lain tetapi hanya di pasar-pasar, ketika berjual-beli. Inilah masyarakat majemuk, dengan bagian-bagian komunitas yang hidup berdampingan, tetapi terpisah dalam satuan politik yang sama" (1948: 304).

Indonesia dipandang sebagai contoh masyarakat majemuk dengan pandangan pluralisme karena anekaragam masyarakat dan kebudayaannya, setidaknya-tidaknya pada masa lampau, kurang berinteraksi satu sama lain, antara lain karena faktor geografis kepulauan. Hipotesa ahli ilmu politik seperti P. Laslett

(1982) mungkin benar bahwa sistem kekuasaan otoritarian adalah bentuk adaptif dari suatu pengaturan masyarakat majemuk dengan populasi besar yang terikat sebagai suatu negara-bangsa yang tinggal di pulau-pulau yang banyak dan tersebar luas. Melonggarkan kekuasaan otoritarian itu akan membawa persoalan besar bagi integrasi nasional. Kritik orang atas konsep pluralitas itu datang silih berganti. Namun tak satu pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan.

Konsep Furnivall itu kemudian diadopsi oleh M.G. Smith (1965), salah seorang tokoh penting yang mengembangkan teori tentang masyarakat majemuk dalam antropologi. Smith menemukan konsep masyarakat majemuk ini penting untuk kepentingan analisa ketika untuk pertama kali ia menemukan anekaragam bentuk struktural pada masyarakat Karibia yang ditelitinya, dan kemudian membanding-bandingkannya. Menurut Smith, model masyarakat majemuk yang berlandaskan ras mengabaikan kemungkinan landasan lain, seperti kelas sosial atau agama. Smith berargumen konsep pluralisme diperlukan sebagai konsep payung yang akan digunakan secara komparatif dalam antropologi sosial. Akan tetapi, ada sebagian antropolog yang mengkritik pendapat Smith bahwa ia tidak berhasil menjelaskan konteks historis dari apa yang disebutnya masyarakat majemuk itu. Mereka mengemukakan bahwa masyarakat majemuk itu akan lebih berguna jika dilihat sebagai konteks historis daripada sebagai bentuk-bentuk struktural. Sebagian antropolog lain menaruh curiga bahwa konsep masyarakat majemuk adalah konstruksi kolonial. Dengan konsep ini muncul kemudahan bagi kaum kolonial untuk mengembangkan pengaturan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan dengan mengatasnamakan integrasi nasional. Dengan konsep tersebut terbuka kemungkinan potensi untuk mempraktikkan diskriminasi ras – dan kadang-kadang etnik – kategorisasi dan kodifikasi hukum. Dalam bentuk yang paling ekstrim, pluralisme rasial digunakan untuk melakukan segregasi, mengisolasi, dan

menyingkirkan suatu etnik, misalnya seperti yang terjadi dalam politik perbedaan warna kulit di Afrika Selatan pada abad yang lalu.

Teori masyarakat majemuk mengabaikan ciri polietnik kebanyakan masyarakat di Dunia Ketiga sehingga kurang mempengaruhi kecenderungan kajian pascakolonial maupun kajian etnik. Seraya terus menyesuaikan diri terhadap kritik-kritik yang dilancarkan kepadanya, teori Smith mengalami kemunduran secara konseptual karena terdesak oleh teori-teori pluralisme kebudayaan.¹ Pluralisme kebudayaan mencakup gagasan bahwa perbedaan-perbedaan kebudayaan secara historis di antara berbagai masyarakat seharusnya dihargai oleh penguasa (baca: pemerintah) yang menjamin persamaan hak-hak mereka dalam masyarakat bangsa. Banyak orang kemudian berpandangan bahwa konsep pluralisme kebudayaan dapat diterapkan secara lebih universal daripada model masyarakat majemuk yang dianggap mempertahankan status-quo kekuasaan kolonial.

Multikulturalisme

Berbeda dari konsep pluralisme yang menekankan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, sehingga setiap kebudayaan dipandang sebagai entitas yang distinktif, maka multikulturalisme lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya.

¹ Berkembangnya teori-teori pluralisme kebudayaan didorong antara lain oleh (1) lahirnya negara-negara baru merdeka setelah Perang Dunia II; (2) semakin majunya teknologi komunikasi yang membebaskan masyarakat-masyarakat yang tadinya terisolasi; (3) meningkatnya kesadaran akan hak-hak sebagai bangsa dalam tatanan dunia; (4) menguat dan menyebarnya pemikiran demokrasi dan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Keempat faktor pendorong ini turut melandasi dibangunnya teori-teori pluralisme kebudayaan yang secara praktis menghendaki pengakuan akan hak-hak yang sama sebagai warga kebudayaan dunia. Pembahasan ini antara lain dapat dilihat dalam Clifford Geertz dan David Apter, eds. (1969) *The Old Societies and New States*. Chicago: Aldine Publications.

Membangun masyarakat multikulturalisme Indonesia berarti membangun suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral.²

Namun, sebagaimana halnya setiap konsep dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial, konsep multikulturalisme tak luput dari perbedaan pengertian. Mengikuti Bikhu Parekh (2001) istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni, pertama, konsep ini terkait dengan kebudayaan; kedua, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan; dan ketiga, konsep ini mengandung cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh sebab itu multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang atau semacam ideologi dalam kehidupan manusia. Oleh karena hampir semua negara di dunia tersusun dari anekaragam kebudayaan – artinya perbedaan menjadi dasarnya – dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme sebagai ideologi itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara dengan mengutamakan kesetaraan dan saling menghargai. Tetapi, yang masih menjadi pertanyaan besar, model kebijakan multikultural seperti apa yang dapat dikembangkan oleh suatu negara-bangsa seperti Indonesia?³

² Perlu kita catat bahwa upaya membangun masyarakat Indonesia yang multikultural itu bukanlah hal baru. Meski istilah akademik ini belum dikenal para tokoh yang membangun Indonesia, pemikiran yang memiliki semangat yang sama dengan multikulturalisme setidaknya sudah ada semenjak Sumpah Pemuda 1928, atau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang kemudian diadopsi oleh Koentjaraningrat (1982) untuk mendefinisikan kebudayaan nasional. Konsep multikulturalisme ini kemudian dibicarakan sebagai konsep ilmiah di Indonesia terutama setelah reformasi 1998 digulirkan, karena konflik-konflik justru terjadi di berbagai daerah pada masa reformasi ini, dan dirasakan kebutuhan mendesak untuk kembali merekat persatuan nasional.

³ Konsep kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah seolah terlupakan pada masa reformasi, dan bahkan konsep ini seolah dicurigai sebagai politik kebudayaan Orde Baru yang otoritarian, di mana

Kemajemukan kebudayaan, negara-bangsa, dan nasionalisme. Negara-bangsa seperti Indonesia dapat dikatakan lahir dan berkembang bersamaan dengan menguatnya semangat nasionalisme di dunia yakni pada separuh pertama abad kedupuluh. Konsep nasionalisme sendiri bersendikan tiga unsur, yaitu kesadaran identitas bersama, suatu ideologi mengenai kesejarahan bersama dan rasa senasib sepenanggungan, dan adanya suatu gerakan sosial bersama demi mencapai satu tujuan bersama. Nasionalisme akan menguat apabila setiap unsur di atas mengalami peningkatan akibat adanya kekuatan dari luar yang dianggap mengancam. Hadirnya musuh dari luar, misalnya, akan dapat memperkuat nasionalisme itu (Smith 1981).

Kemajemukan kebudayaan, selain merupakan ciri yang melekat pada negara-bangsa Indonesia, juga menjadi faktor pendorong dikembangkan dan diterapkannya model kebijakan masyarakat majemuk karena model itu dapat diharapkan mampu mengikat keanekaragaman yang ada. Akan tetapi, karena unsur-unsur pembentuk negara-bangsa Indonesia itu sangat beranekaragam baik secara geografi, fisik, populasi, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, maka model kebijakan pluralistik pada masa itu dianggap paling masuk akal dan memenuhi kebutuhan sebagai pengikat kesatuan nasional yang terintegrasi. Akan tetapi, di pihak lain, unsur dari negara-bangsa yang dominan akan memperoleh posisi yang lebih diuntungkan daripada unsur yang tidak dominan. Secara teoretis, unsur dominan kerap kali diasosiasikan dengan unsur mayoritas, meskipun hal ini tidaklah selalu benar. Banyak contoh menunjukkan bahwa unsur mayoritas bukan unsur dominan dalam ekonomi, atau unsur minoritas justru dominan dalam konteks ekonomi. Nasionalisme dalam konteks negara-bangsa ini sebagai landasan integrasi nasional menjadi signifikan dan

kontrol oleh pemerintah pusat sangat besar sehingga peluang untuk mencapai kesetaraan itu menjadi minimal. Di sisi lain, upaya menemukan model multikulturalisme Indonesia yang mampu merekat kembali persatuan dan integrasi nasional juga belum berhasil.

instrumental dalam mempersatukan seluruh rakyat dalam batas-batas wilayah negara-bangsa, dan dalam memobilisasi rakyat untuk melawan pihak atau bangsa lain yang mengancam kedaulatan negara bangsa.

Menjelang akhir abad kedua puluh dunia ditandai oleh perubahan global yang cepat dan intens. Perubahan itu melibatkan semua aspek kehidupan manusia di dunia seperti ekonomi, sosial, komunikasi, politik, dan kebudayaan. Kemajuan teknologi adalah unsur kebudayaan yang disebut-sebut sebagai penyebab semua aspek kehidupan yang lain turut berubah. Banyak perubahan yang terjadi direkam oleh ahli antropologi dalam etnografi mengenai masyarakat-masyarakat yang masih tinggal di pedesaan atau bahkan di pedalaman, dan mereka menyimpulkan bahwa masyarakat-masyarakat tersebut ternyata juga mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan kehidupan mereka. Para antropolog mulai membangun pemahaman baru, bahwasanya pengetahuan masyarakat setempat melampaui batas-batas teritorial di mana mereka tinggal. Atau, mereka membangun hipotesa-hipotesa mengenai kebudayaan translokal atau transnasional.

Apabila gejala translokal, transnasional, atau transkultural itu dibawa ke dalam konteks nasionalisme yang berbasis negara-bangsa sebagaimana saya kemukakan di atas, maka persoalan batas-batas negara-bangsa mulai menjadi persoalan. Paling tidak ada tiga persoalan yang mengemuka: pertama, nasionalisme yang memiliki tiga sendi, yakni kesadaran identitas yang sama, kesadaran historis yang sama, dan gerakan sosial bersama untuk menghadapi kekuatan dari luar yang mengancam, nampaknya tidak lagi begitu kuat sebagaimana masa separuh pertama abad kedua puluh ketika banyak sekali negara baru di seluruh dunia, yang baru saja merdeka dari kolonialisme Barat. Nasionalisme pada negara-bangsa direduksi menjadi batas-batas administratif dan hukum negara di mana warga negara harus meminta izin lebih dahulu kepada pemerintah yang bersangkutan bilamana akan pergi ke luar batas negara dan

atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar negaranya.

Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak telah mendorong warga negara bangsa yang memiliki kemampuan untuk memiliki dan menggunakan kebudayaan teknologi itu untuk mengembangkan komunikasi secara transnasional dan transkultural. Namun, di pihak lain warga negara bangsa yang tidak memiliki kemampuan itu akan tertinggal, dan tidak akan turut dalam mengembangkan komunikasi demikian itu, tetapi merasakan dampak jangka panjang sebagai stratum terbawah dalam komunikasi global.

Ketiga, kesadaran (dan kebanggaan) akan identitas bersama sebagai satu nasion, dan kesadaran sejarah bersama dan senasib sepenanggungan, khususnya di kalangan generasi-generasi yang lebih muda kini dan yang akan datang akan mengalami kemerosotan. Memudarnya unsur-unsur sendi nasionalisme ini niscaya akan melemahkan negara-bangsa itu sendiri.

Ketiga persoalan di atas penting sekali diutarakan karena di samping gejala perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat tersebut, dalam tatanan global kita juga menyaksikan perkembangan baru dalam konsep dan pemahaman mengenai manusia, seperti konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan gerakan multikulturalisme. Konsep-konsep ini bersama-sama merasuki kehidupan negara bangsa, tak terkecuali Indonesia, dalam bentuk demokrasi global, hak asasi manusia universal, dan gerakan semesta multikulturalisme. Oleh karena itulah, isu multikulturalisme menjadi penting dan relevan dibicarakan dalam tulisan ini.

Multikulturalisme sebagai Pendekatan dan sebagai Kebijakan Nasional

Sebagaimana dikemukakan di atas multikulturalisme adalah suatu ideologi jalan keluar dari persoalan mundurnya kekuatan integrasi dan kesadaran nasionalisme suatu

bangsa sebagai akibat dari perubahan-perubahan di tingkat global. Indonesia, khususnya, mengalami perubahan tersebut belakangan ini. Setidak-tidaknya kekhawatiran terjadinya kemunduran dalam kesadaran nasionalisme telah terbukti akhir-akhir ini. Contoh yang paling nyata adalah semakin meningkatnya keinginan beberapa daerah tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun sebegitu jauh pemerintah masih mampu meredam kehendak tersebut sehingga perceraian daerah-daerah tersebut belum terwujud pada saat ini. Selain itu, konflik-konflik yang terjadi akibat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga meningkat pada awal abad kedua puluh satu ini.

Sebagian orang berpendapat bahwa konflik-konflik itu terjadi karena kontrol negara yang selama otoriter telah melonggar, tetapi menjadikan kontrol itu kembali ketat nampaknya bukan jalan keluar yang terbaik karena Indonesia (pemerintah) akan berhadapan dengan arus kekuatan global yang lebih menyukai demokrasi, sehingga secara politik negara ini akan tersingkir dari pergaulan dunia. Akan tetapi, membuka lebih lebar lagi “keran-keran” keterbukaan juga mengandung risiko jangka panjang, yakni kemungkinan tercerai-berainya negara-bangsa ini menjadi sejumlah negara-negara yang lebih kecil.⁴ Hal ini yang mendorong sebagian ahli untuk memikirkan alternatif solusi terbaik agar tidak terjebak kedalam perpecahan, yakni jalan multikulturalisme. Baiklah kita perhatikan sejenak beberapa model multikulturalisme di bawah ini.

Secara hipotetis, semua atau sekurang-kurangnya sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model

multikulturalisme (lihat, Parekh 1997; 2001). Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas (*nationality*). Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan anekaragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Model ini memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Sebagai konsekuensi dari diterapkannya model ini adalah tidak diperhatikannya akar kebudayaan etnik-etnik penyusun negara, dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Banyak orang menuding model ini sebagai penghancur kebudayaan etnik. Model kebijakan multikulturalisme ini rentan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional tersebut berada di tangan suatu kelompok elite tertentu yang menguasai negara. Nasionalitas dan nasionalisme menjadi tameng bagi para elite untuk mencapai tujuannya. Perancis adalah contoh negara yang menerapkan model ini. Di negara ini diberlakukan aturan-aturan bagi semua individu warga negara Perancis tanpa memperhatikan latar belakang etnik, dan sekaligus larangan untuk memanasifasikan identitas kebudayaan etnik atau agama ke tatanan publik. Larangan menggunakan jilbab di Perancis baru-baru ini adalah salah satu contoh bekerjanya model nasionalitas tersebut.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para *founders*. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing. Jerman dikenal sebagai bangsa yang menggunakan model multikulturalisme ini secara konsisten. Khususnya pada masa lampau, orang Jerman yang diakui sebagai bangsa Jerman adalah orang yang berasal dari etnik Arya, dan tindakan pemurnian ras Jerman menjelang Perang Dunia II adalah

⁴ Belakangan memang sering dibicarakan tentang masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kekhawatiran akan terjadi seperti tercerai-berainya Uni Soviet menjadi sejumlah negara menjelang akhir 1990-an. Kasus Uni Soviet sering digunakan sebagai contoh nasib suatu bangsa besar yang mengalami konflik internal dengan akibat yang tak terbayangkan sebelumnya.

sebuah contoh ekstrim bekerjanya model multikulturalisme nasionalitas-etnik.

Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Model ini diterapkan terutama oleh negara-negara yang memiliki persoalan orang pribumi (aborigines) dan orang pendatang (migrants) seperti Kanada dan Australia. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Apabila kekuasaan negara lemah, karena prioritas kekuasaan dilimpahkan kepada anekaragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, maka negara mungkin diramaikan oleh konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.

Kalau kita simak secara mendalam ketiga model di atas, nampaknya sukar bagi kita untuk mengatakan model yang mana yang sesuai untuk kondisi Indonesia karena kesesuaian dan keberlakuan model juga ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif Indonesia seperti geografi kepulauan yang sangat luas dengan jarak yang berjauhan satu sama lain, keanekaragaman etnik dan agama dan golongan sosial, jurang sosial-ekonomi yang semakin dalam, dan – yang tak kalah penting adalah arus besar (mainstream) politik dan ekonomi dunia global yang mempengaruhi arah kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Model multikulturalisme seharusnya adalah suatu bentuk sosio-kultural adaptif yang sesuai dengan kondisi-kondisi menyeluruh Indonesia.

Model multikulturalisme nasionalitas jelas tidak relevan dibicarakan di Indonesia, karena sejak negara ini dibangun, meskipun istilah multikulturalisme belum dikenal, bangsa Indonesia sudah jelas menyatakan

dirinya “Bhinneka Tunggal Ika” yang menunjukkan diperhatikannya keanekaragaman kebudayaan. Model multikulturalisme nasionalitas-etnis juga tidak dikenal di Indonesia karena persoalan rasial sesungguhnya tidak dominan. Kalaupun isu rasial pribumi-Cina yang mengemuka beberapa tahun terakhir lebih merupakan isu ekonomi-politik daripada isu etnik, dan bukan dalam pengertian nasionalitas-etnik seperti di Jerman. Selain itu, beberapa kebijakan kewarganegaraan seperti asimilasi pada tahun 1960-an justru menunjukkan keinginan negara untuk mendekatkan golongan etnik Cina dengan mayoritas pribumi. Model multikulturalisme yang mengedepankan kesetaraan juga mengandung risiko. Populasi yang sangat besar selalu rentan perpecahan, terlebih jika kondisi-kondisi obyektif seperti diutarakan sebelumnya kurang mendukung proses demokratisasi kebudayaan yang *notabene* adalah pesan di balik multikulturalisme tersebut.

Membumikan Multikulturalisme

Patut pula kita catat bahwa ketiga model di atas berguna untuk kepentingan analisis karena ketiganya bukanlah kontras satu sama lain mengingat dalam setiap model terdapat juga unsur-unsur yang mencerminkan sebagian isi model lainnya. Model multikulturalisme memiliki premis bahwa masing-masing kebudayaan diakui dan harus menjaga kebudayaannya sendiri, hidup berdampingan secara damai. Hingga kini masih terus diupayakan untuk menemukan model yang pas untuk kondisi Indonesia masa kini dan proyeksi ke masa depan.

Salah satu wacana penting mengenai multikulturalisme adalah pendidikan multikultural sebagai strategi jangka panjang meskipun konsep ini mengundang banyak kontroversi pendapat. Salah satu kritiknya adalah bahwa pendidikan multikultural itu bersifat “memecah-belah” karena pengakuan terhadap hakikat hidup setiap kebudayaan akan melahirkan bentuk-bentuk yang khas pendidikan multikultural yang belum tentu berujung pada kepentingan integrasi kebudayaan secara nasional. Pendidikan multikultural ini

belum tentu sejalan dengan terpeliharanya nasionalisme (Watson 2000).

Akan tetapi, nampaknya belum ada jalan keluar yang lebih pas daripada pendidikan multikultural sejauh rancangan kurikulum pendidikan tersebut dibangun dengan cermat dan komprehensif.⁵ Lokakarya internasional pendidikan multikultural di Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap negara berupaya merumuskan pengertian dan penerapan konsep pendidikan multikultural tersebut dan selalu cenderung fleksibel untuk mengalami perubahan (Sunarto dkk. 2004). Apa yang terjadi di Indonesia juga demikian. Dibutuhkan waktu lama untuk merencanakan kebijakan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi bangsa kita, dan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menerapkan dan menuai hasilnya. Itupun kalau dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Chua Beng Huat (2002) *Multiculturalism in Island South East Asia. A Keynote Address at the 3rd International Symposium of the Jurnal Antropologi Indonesia*, 16-19 July, Denpasar-Bali, Indonesia.
- Furnivall, J.S. (1948) *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and the Netherland Indies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1966) "Religion as a Cultural System," *Anthropological Approaches to the Study of Religion* (M. Banton, ed.). London: Tavistock.
- Menteri Negara Urusan Otonomi Daerah (2000) *Undang-Undang No.22 Tahun 1999*. Jakarta: Menteri Negara Urusan Otonomi Daerah.
- Parekh, B. (2001) *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Parekh, B. (1997) *National Culture and Multiculturalism*. In Kenneth Thompson (ed.) *Media and Cultural Regulation*. London-Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications in association with the Open University.
- Saifuddin, A.F. (2000a) *Agama dalam Politik Keceragaman. Kebijakan Keagamaan Pada Masa Orde Baru* (A.F. Saifuddin, ed.). Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Departemen Agama RI.
- Saifuddin, A.F. (2000b) *Kebijakan Otonomi Daerah: Otonomi Pendidikan dalam Perspektif Sosial Budaya*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th.XXVI, No.65, hal. 1 – 12.
- Saifuddin, A.F. (2004) *Multicultural Education in Indonesia: Putting School First (A Lesson from the Education Autonomy Policy Implementation)*. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar* (Kamanto Sunarto, Russel Heng Hiang Khng, A.F. Saifuddin, eds.). Jakarta: TIFA in cooperation with *Jurnal Antropologi Indonesia*, PP.86-97.
- Saifuddin, A.F. Zulyani Hidayah (2000) *Politik dan Etnisitas: (Re) konstruksi ke Melayuan di Riau. Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta: LIPI bekerjasama dengan Ford Foundation, hal. 567 – 586.
- Smith, A.D. (1981) *The Ethnic Revival*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, M.G. (1965) *The Plural Society in the*

⁵ Sebagai contoh, Jurnal Antropologi Indonesia UI menyelenggarakan International Workshop on Multicultural Education pada tahun 2004 dengan menghadirkan pakar-pakar dari negara-negara Asia Tenggara dan Australia, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan pendidikan multikultural di negara masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam Kamanto Sunarto, Russel Hiang-Khng Heng, Achmad Fedyani Saifuddin, eds. (2004) *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia. Stepping into the Unfamiliar*. Depok: Jurnal Antropologi Indonesia.

- British West Indies. Berkeley: University of California Press. 8, pp.411 – 29.
- Turner, T. (1993) Anthropology and Multiculturalism: What Anthropology that Multiculturalism should be Mindful of? In Cultural Anthropology, Watson, C.W. (2000) Multiculturalism. London: Open University Press.

TANTANGAN MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN

Irwan Abdullah

Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada

Abstract

The author starts his discussion from the roots of appearance of multiculturalism idea in the world. This article gives clues of problems that Indonesia facing while driving multiculturalism idea on its development and at last, the author discuss about the development goals based on multiculturalism. The author starts his description about the condition of retroactive to cultural diversity on orde baru that faces homogenization process on the whole aspect of life with political idiom called "asas tunggal". Cultural differences seem as an obstacle of integration factors.

This article put on a culture as a development potential. This is what denied by orde baru government. This article ended discussion about the important of social resources (social capital) and citizen participation in the development process.

Keywords: *cultural diversity, development, multiculturalism*

Pendahuluan

Paham multikulturalisme, yang juga disebut etnokritisisme pertama kali marak di Kanada pada tahun 1960, kemudian berlanjut di Amerika Serikat, Inggris dan Australia ada kurun waktu tahun 70-an (Wieviroka 1998: 885-889; Suparlan 2000: 99). Meski ide Multikulturalisme lahir di Barat, setidaknya masyarakat Indonesia mampu belajar dari ide *planetary humanism* karena hingga sekarang ide multikulturalisme dapat digunakan sebagai *check and balance* terhadap model pembangunan dan modernisasi yang dijalankan pemerintah. Ide multikulturalisme sesuai dijalankan di Indonesia sekarang, mengingat warga negara kita telah mengalami proyek asimilasi; seragamisasi orde baru selama 32 tahun, yang ternyata gagal dan justru menimbulkan berbagai konflik antar-etnis di berbagai wilayah; diskriminasi politik terhadap beberapa etnisitas yang dianggap membangkang terhadap pembangunan (Aime Touress 2003: 34–35; Suparlan 2001: 34).

Ide yang bersifat *Anglophone* ini marak seiring dengan munculnya sejumlah fenomena. Pertama, munculnya gerakan warga negara yang ingin menegaskan identitas asli mereka. Warga negara ini mengalami titik kulminasi kejenuhan terhadap bentuk pembangunan yang menekankan uniformitas, yang mana kaum migran atau warga pendatang dari berbagai latar belakang dilebur "dipaksa" menjadi satu-kesatuan asimilasi di bawah payung negara (Kanada, AS, Inggris, Australia). Dalam hal ini, ide multikulturalisme merupakan kritik terhadap ide asimilasi. Kedua, proses kematangan modernitas yang ditandai dengan naiknya tingkat edukasi warga negara; tersedianya jasa transportasi dan komunikasi massa tampak dari semakin membanjirnya kaum migran yang datang ke berbagai tempat. Ketiga, fenomena tentang adanya pertanyaan dan pengkritisan ulang terhadap narasi nasionalisme (sejarah kebangsaan, asal usul identitas masing-masing etnik, politik diskriminasi yang selama ini

dibangun oleh pemerintah). Keempat, multikulturalisme juga muncul karena adanya akademisi dan politisi yang menghadirkan kritik-kritik sosial, kultural dan politik, seperti *Black Power*, kaum feminis, Gay Pride, dll. Kelima, munculnya ide multikulturalisme merupakan kritik sekaligus solusi alternatif terhadap proyek-proyek modernitas, yang mengabaikan kekuatan identitas manusia yang beragam, meskipun itu minoritas. Ide multikulturalisme merupakan salah satu bagan dari kerangka pemikiran postmodernisme (Appadurai 2003: 137–157; Spivak & Sneja 1993: 193–203).

Persoalan multikulturalisme di Indonesia juga tampak dari fakta bahwa parameter keberhasilan suatu pembangunan yang diukur berdasarkan hitungan kuantitatif. Hal ini bisa kita lihat bahwa Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terstabil pada tahun 1991–1993, di mana laju pertumbuhan stabil sebesar 6–7%. Laju rata-rata pertumbuhan penduduk stabil 1,5–2% setiap tahunnya. Itulah mengapa pola determinasi ekonomi sangat dikemukakan dalam pembangunan juga teori struktural fungsional (Parson). Sifat hitungan pembangunan berdasarkan hitungan numerisasi struktur telah menghilangkan prinsip, pengalaman dan pandangan individu secara mendalam (Parson 1977: 43–46). Metode kuantitatif/statistik hanya mampu menghitung jumlah komposisi etnis di Indonesia, serta tingkat persebarannya. Mencermati suatu gejala yang tersembunyi dari ide multikulturalisme dan menangkap kebenarannya tidak bisa dihitung berdasarkan angka-angka statistik dan metode kuesioner dengan menggunakan responden yang kemudian akan ditinggalkan begitu saja. Pencerminan terhadap multikulturalisme membutuhkan ruang kualitatif dalam metodologi yang interpretatif dan deskriptif mendalam; narasi etnografi dan fenomenologis. Tulisan ini tidak ingin mendiskusikan persoalan metodologis, namun mencoba memberikan pemetaan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalankan ide multikulturalisme dalam

pembangunan. Pada bagian-bagian berikut ditegaskan bahwa multikulturalisme menghadapi sejumlah tantangan untuk dapat dijalankan di Indonesia.

Diversitas Budaya: Peningkaran Hak untuk Berbeda di Indonesia

Sewaktu formasi negara-bangsa modern sejak tahun 1945 terjadi di Indonesia, saat itu kesadaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa mulai tumbuh. Nasionalisme mulai menjadi alat penting dalam memperkuat rezim pemerintahan dan penataan sosial. Satu kesadaran penting pada saat itu dan kemudian berlanjut secara lebih tegas pada masa orde baru adalah integrasi sosial hanya mungkin dicapai dalam masyarakat yang homogen. Nasionalisasi kemudian berarti homogenisasi kehidupan dalam segala aspeknya untuk menuju pada suatu tatanan yang bersifat total. Perbedaan-perbedaan bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai sebuah kesalahan melalui bahasa dan teknik politik “*asas tunggal*”. Perbedaan hampir menjadi dosa karena perbedaan itu akan diberi label “PKI” atau “*subversif*”, suatu istilah yang hampir tidak terdengar dewasa ini.

Fakta tentang bahasa Indonesia yang mencapai 512 bahasa telah diingkari sebagai variasi dan diversifikasi ekspresi yang menyimpan perbedaan logika dalam berpikir. Bahasa di sini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai kepribadian karena di dalam bahasa yang beragam itu tersimpan sopan santun dan tata kelakuan yang berbeda-beda. Tidak ada salahnya usaha menuntut penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan karena masyarakat yang beragam membutuhkan alat komunikasi yang lebih universal, tetapi keberadaan bahasa daerah tidak dinafikan, apalagi dibiarkan mati secara perlahan-lahan karena pemakaian bahasa akan kehilangan mode ekspresi yang paling dalam. Kebijakan penggunaan bahasa nasional di satu sisi dan penghapusan bahasa-bahasa daerah di sisi lain merupakan kesalahan besar karena telah melahirkan suatu sistem sosial yang seragam dan mengingkari bahasa daerah yang

kaya dan fungsional. Bahasa yang berfungsi memperkaya bahasa nasional dan kepribadian bangsa itu telah mengalami nasib yang memprihatinkan karena tidak ada komitmen yang besar untuk memelihara pluralitas dalam bentuk-bentuk yang jelas (Rosjidi 1999; Abdullah 1999).

Penataan keagamaan merupakan contoh lain yang signifikan untuk memperlihatkan bagaimana visi pemerintah tentang pluralisme budaya. Kesalahan yang fatal telah dilakukan akibat kesalahan pemahaman dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan rezim orde lama ke orde baru. Untuk membendung pengaruh paham komunisme, negara telah memaksakan kehendaknya dengan mendorong warga negaranya untuk memilih 5 agama yang diakui di Indonesia. Dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun, proses tersebut telah membendung dan telah membunuh berbagai kebudayaan lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap sebagai komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan pemilihan agama dan perkembangan agama-agama suku. Keragaman agama dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian kekayaan itu punah. Termasuk agama konghucu yang tidak dapat berkembang akibat tekanan politik yang sangat besar. Pada tingkat kepercayaan, di berbagai daerah dikenal parmalin, pelbegu, kaharingan, dll. yang tidak mendapatkan ruang ekspresi akibat kebijakan agama yang menekan pluralitas. Pada saat kebijakan pengakuan atas hanya 5 agama diberlakukan negara telah menggunakan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagamaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agama dalam hal ini bahkan telah menghancurkan berbagai jenis kebudayaan daerah. Kebudayaan jawa yang sangat kaya dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan-lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi jawa Islam atau Kristen.

Perbedaan-perbedaan etnis telah dikesampingkan karena telah dilihat sebagai faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi orde baru (Soedjatmoko 1983). Tanpa adanya beberapa kecenderungan dalam politik penataan etnis ini, khususnya dari proses eksklusi dan inklusi sosial etnis tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis mayoritas mendapat "privelese-privelese" dalam berbagai bentuk, sementara etnis yang tidak memiliki *back up* mengalami marginalisasi. Orang jawa telah mendapatkan privelese pemerintah dalam progam transmigrasi atau orang madura telah mendapatkan privelese di Kalimantan. Pembagian sumber daya dalam berbagai bentuk mengikuti garis etnis atau garis agama yang muncul dalam berbagai bentuk.

Demikian juga ekspresi sosial dan budaya berbagai etnis yang mengalami tekanan yang sangat kuat dari negara. Berbagai jenis tarian dari berbagai suku bangsa marginal (terutama Cina) telah dipasung dan dicoba dihentikan melalui kebijakan tersebut. Kebudayaan lokal di berbagai daerah telah diabaikan dan digantikan dengan kebudayaan yang direstui oleh negara. Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan telah terjadi pada masa orde baru dan orde-orde sesudahnya belum juga melihat pentingnya pengembangan budaya lokal. Pada masa orde baru kita sibuk dengan upaya pengembangan kebudayaan nasional. Upaya menemukan kebudayaan nasional telah menjadi upaya yang sia-sia yang justru telah menyebabkan kita mengingkari kebudayaan lokal. Kebudayaan nasional sama sekali bukan puncak-puncak kebudayaan daerah, ia harus menjadi sintesis alami dari kebudayaan daerah.

Persoalan lain muncul dalam kesalahan interpretasi kebudayaan yang hanya melihat kebudayaan sebagai kebudayaan material. Kesalahan ini telah memunculkan berbagai kesalahan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan aset bangsa. Larangan untuk menggunakan peninggalan candi-candi di Jawa dan luar Jawa sebagai

tempat pelaksanaan aktivitas ritual merupakan kesalahan interpretasi dan pemahaman tentang kebudayaan tersebut. Semestinya pemerintah memberikan kebebasan kepada pendukung suatu kebudayaan untuk memanfaatkan peninggalan tersebut sebagai tempat beraktivitas, sehingga kebudayaan tidak mati sebagai materi yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Penggunaan Candi Borobudur sebagai tempat sembahyang umat Budha, Candi Prambanan dan candi-candi hindu lainnya bagi umat Hindu hendaknya dibuka. Hal ini jauh lebih meningkatkan kepedulian warga terhadap keberadaan benda-benda peninggalan.

Adanya aturan yang menetapkan bahwa berbagai bangunan candi dan peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya merupakan suatu kesalahan konseptualisasi yang parah. Pelarangan penggunaan candi-candi di Jawa sebagai tempat ibadah atau aktivitas masyarakat setempat adalah kurang tepat karena kebudayaan justru hidup jika ada pendukungnya. Pemerintah bahkan telah menjual peninggalan-peninggalan semacam ini dengan mangkapling-kapling peninggalan budaya sebagai objek wisata. Masyarakat pendukung kebudayaan tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Pendukung kebudayaan tetaplah miskin sementara tengkulak kebudayaan menjadi kaya-raya dengan mengubah budaya menjadi objek wisata.

Pemberian wewenang kepada dinas purbakala dan kebudayaan sebagai pengelola cagar budaya bersifat sangat bias negara. Negara menjadi sebuah agen yang begitu dominan dan mengesampingkan peran serta masyarakat. Di awal tahun 2000 dan 2001, di Bali terjadi perdebatan yang sangat keras, ketika Pura Besakih sebagai pura terbesar di Bali akan dimasukkan dalam benda cagar budaya. Berbagai argumen dari yang setuju dan tidak setuju telah dimunculkan. Persoalannya adalah tidak adanya kesamaan persepsi tentang benda cagar budaya sehingga sangat perlu diselesaikan dengan membuat definisi yang tepat tentang cagar budaya.

Dalam berbagai kajian pembangunan di Indonesia, masalah kebudayaan tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius. Bahkan di masa orde baru, kriteria kemajuan suatu desa dilihat dari kompleksitas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adat-istiadat. Semakin kompleks keterlibatan masyarakat dalam aktivitas itu maka semakin rendah nilai yang diperolehnya. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan para elite tidak pernah melihat sebuah kebudayaan sebagai potensi pengembangan. Kebudayaan lokal masih diinterpretasikan sebagai beban bagi kehidupan pembangunan mereka.

Kecenderungan menempatkan kebudayaan dengan cara semacam itu dapat dilihat dari munculnya kesadaran nasionalisme yang berlebihan dalam sistem pemerintahan orde baru. Seluruh tindakan kebijakan telah dijiwai oleh apa yang disebut dengan “kepentingan nasional” yang dari waktu ke waktu memperlihatkan kekaburan sistem referensi apa yang disebut “nasional” itu, khususnya kerancuan dalam pendefinisian pusat dan daerah. Dalam proses semacam inilah definisi tentang praktik kebijakan dan kenyataan sosial dilakukan di pusat dengan dan atas nama kepentingan nasional (pusat) itu.

Masalah Prioritas dalam Pembangunan

Pembangunan di Indonesia mengalami persoalan pada saat prioritas utama diberikan pada bidang ekonomi yang kemudian tidak hanya mempengaruhi penataan infrastruktur, tetapi juga struktur dan juga suprastruktur yang menyangkut ide multikulturalisme. Revolusi hijau (green revolution) merupakan contoh di mana proses homo ekonomikus telah berlangsung dalam bidang pertanian yang menjauhkan petani dari kearifan lokal yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas. Dalam program revolusi hijau tersebut, sebanyak 257 jenis padi lokal hilang di Jawa, yang sebelumnya dikenal dengan nama-nama antara lain gogo lempuk, kawoeng, dewi tara, tjina, sigadis, mandjetti, gendjah lampung,

rodjo lele. Di Dayak Hulu Sungai Bahau, misalnya, tidak kurang dari 54 ragam varietas padi musnah di kalangan peladang berpindah. Di Dayak Krayan sekitar 37 ragam varietas padi hilang (Kudhori 2002: 111–120).

Kegagalan multikulturalisme juga tampak pada rencana pembangunan 5 tahun (repelita) yang kemudian proses tinggal landas menyebabkan basis-basis lokal yang merupakan potensi tidak diperhitungkan dan bahkan dipungkiri keberadaannya. Proses ini telah merentankan ketahanan pangan karena stok penyangga pangan berbagai suku bangsa yang beragam menghilang digantikan oleh suatu sistem pangan yang seragam, yakni bertumpu pada beras sebagai bahan makanan pokok.

Tujuan dari bentuk politik pembangunan yang *simplification* terhadap kemajemukan dalam berbagai bentuk dimaksudkan untuk terciptanya stabilitas pembangunan dengan mengintegrasikan semua kemajemukan identitas warga negara. Stabilitas pembangunan juga membutuhkan warga negara yang *legible* (mudah dibaca dan diawasi) gerak-geriknya (Scott 1998: 53–63). Proses simplifikasi ini dinilai sebagai bagian dari usaha modernisasi sejalan dengan proses pembangunan yang diidealkan. Masyarakat modern (masyarakat yang patuh terhadap peraturan; *melek*-teknologi; disiplin; kerja keras; rasional) dianggap sebagai bentuk tujuan pembangunan yang ideal. Sedangkan, bentuk masyarakat modern itu dianggap berposisi biner dengan tradisionalisme, tribalisme, dan etnosentrisme, sehingga bentuk masyarakat tradisional dianggap tidak sama dengan nilai pembangunan (Scott 1998: 73–83). Bentuk etnosentrisme dianggap mengancam integrasi sistem nasional dan kebangsaan Indonesia sehingga dihindari keberadaannya.

Kurang mendapat perhatian bahwa kebangsaan itu terkait dengan identitas kultural yang telah mengalami transformasi, ketika individu tidak hanya dihubungkan dengan identitas lain yang ada dalam teritori negara, tetapi juga di luar batas teritori budaya. *Glokalitas* merupakan sebuah istilah untuk pencampuran identitas global dan lokal.

Identitas ini kini tengah terjadi, ketika gerak sejarah mengalami perputaran dan perubahan secara cepat, maka dimensi lokal multikulturalisme juga mengalami percampuran dengan multikulturalisme berdimensi global.

Pada saat yang sama multikulturalisme semakin mengembang maknanya ketika pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan. Perluasan multikulturalisme terjadi ketika masyarakat tidak lagi hanya dihubungkan oleh identitas kesatuan negara, melainkan kesatuan global. Hal ini ditandai dengan berbagai bentuk mobilitas, seperti munculnya FDI (Foreign Direct Investment), *cultural hybridity* dalam bentuk kawin campur lintas negara dan ras, *diasporic people* dengan adanya para sarjana yang kerja di luar negeri, termasuk juga *personal networking* yang terjadi begitu luas, khususnya dalam bentuk *virtual community*.

Selain berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan tersebut, model multikulturalisme baru ini mempunyai pola positif terhadap pembangunan sebuah negara. Kini, di tingkat dunia, tingkat *remittance* terhadap negara asal mencapai 60 miliar USD per tahun. Demikian pula jika merujuk pada pekerja kelas menengah Indonesia di luar negeri (yang mampu berbahasa asing sebelum masuk ke negara asing) atau TKI (yang belum mampu berbahasa asing sebelum masuk ke negara tujuan), tak sedikit *remittance*/devisa negara yang dikirimkan ke negara ini. Kedua model pekerja di atas akan mengalami pengalaman multikultural yang melampaui teritori sebuah negara. Dalam posisi Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbesar ketiga di dunia setelah Philipina dan Mexico, maka perluasan ide-ide dan praktik multikulturalisme terjadi secara dahsyat.

Tantangan terhadap ide multikulturalisme tidak hanya berasal dari model pembangunan pemerintah yang sifatnya *uniform* dan *top-down*. Melainkan juga dari “pluralisme sempit” masyarakat itu sendiri (Abdullah, 2006: 32–37) yang lahir dalam bentuk *exclusivity*, *mutual distrust*, dan *inequality frustration*. Bentuk eksklusivitas yang bersifat pemahaman sempit

dapat berupa pemaknaan terhadap kitab suci secara tekstual-literal, sehingga mengabaikan kontekstual masyarakat lokal. Hal ini dipengaruhi oleh entitas etnis sebagai bagian yang esensial, rigid dan tak dapat diubah. Pemahaman ini akan menganggap entitas kelompoknya yang paling benar, sementara kelompok yang ada di luar mereka adalah kafir, munafik, salah, dan bahkan lebih rendah. Kelompok ini juga sulit untuk berkompromi, cepat marah bila mendapat kritikan. Contoh yang paling nyata dari kecenderungan ini adalah munculnya fundamentalisme agama dan bom bunuh diri. Kendala lain adalah *mutual distrust* yang merupakan bentuk hubungan yang tidak sehat yang muncul didasarkan pada masa lalu yang dianggap tidak mengenakkan, sehingga memunculkan keinginan untuk balas dendam dan ketidakpercayaan pada entitas lain. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah sisa konflik yang terjadi di Ambon, Aceh, dan Poso. Sementara faktor *inequality frustration* terjadi dalam bentuk perasaan diperlakukan tidak fair oleh golongan tertentu yang berada lebih di atasnya, sehingga melakukan “jalan pintas” membakar tempat ibadah, membakar fasilitas publik, penjarahan, dan perampokan. “Jalan pintas” inilah yang mengancam terbangunnya ide multikulturalisme. Salah satu solusi untuk kecenderungan ini adalah *Power Sharing* dalam bidang pendidikan dan politik.

Negara, Pembangunan, dan Ide Multikulturalisme

Modernisasi merupakan faktor penting yang menjadi kunci dalam proses pembentukan ide multikulturalisme, yang kemudian melahirkan wacana kritis tentang multikulturalisme. Modernisasi yang ditandai dengan munculnya ilmu-ilmu kuantitatif, obyektif dan rasional. Pada orde baru, ilmu pembangunan yang berkembang adalah ekonomi, khususnya Mazhab Keynesian (ekonomi neo-klasik) yang dikembangkan oleh “Mafia Berkeley” (Soemitri Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Sadli). Mazhab ini

menekankan *ekonomi estatisme* di mana negara menjadi agen tunggal dalam memegang pluralitas ekonomi masyarakat. Selain itu muncul paham Ekonomi Pembangunan Linear J.J. Rostow, yang memandang pola pembangunan dari perekonomian tradisional, perekonomian prakondisi tinggal lepas landas, tahap kematangan ekonomi, tahap konsumsi tinggi. Kelompok lain menganut paham ekonomi liberal, berkiblat pada pasar global, dan investasi luar negeri (Marie Pangestu; Dorodjatun Kuntjoro Jakti; hingga Aburizal Bakrie) (Hadiz dan Dhakidae 2005: 91–106). Implikasi dari kecenderungan ini adalah hilangnya potensi ekonomi kerakyatan/sektor informal yang plural dan tergesernya pasar tradisional.

Dilihat dari paham antropologi, setiap orang seharusnya menduduki peranan sosial yang telah ditentukan oleh struktur-struktur yang telah ditetapkan. Agen yang majemuk (individu; ethnic group) harus menyesuaikan dengan struktur kuasa, melalui empat proses, yakni *adaptation, integration, system goal attainment* (stability and development), dan *pattern maintance* (pola pembangunan bapakisme; agen tunggal sebagai penguasa). Ide struktural fungsional di sini mengharuskan terjadinya integrasi sosial yang menyatukan semua unit kelas dan grup (baik mayoritas maupun minoritas) ke dalam ide kesatuan politik nasional (Hadiz dan Dhajidae 2005: 91 – 106; Parson 1977: 52 – 57; Vermeulen dan Slijer 2000: 9 – 10). Hal ini terkait dengan proses asimilasi kultural yang menjadikan identitas budaya minor melebur ke dalam budaya dominan agar dicapai keseragaman. Anjuran melakukan amalgamasi, demi peleburan suku bangsa menjadi sebuah bangsa, merupakan contoh yang jelas. Salah satu dari komponen modernisasi adalah munculnya negara-bangsa yang menekankan pada bentuk-bentuk rasionalitas birokrasi, seperti pembentukan UU, yang hanya mengakui beberapa agama resmi; proyek beras nasional (menghilangkan pluralitas orang NTT yang mempunyai makanan pokok jagung; Maluku dan Papua yang makan sagu, dst.); seragamisasi

desa (menghilangkan pluralitas Nagari di Minangkabau, Banjar di Bali, dst.) (Bdk Bagchi, Amiya Kumar 2000: 398).

Arah dari proses pembangunan harus menuju pada proses pembukaan ruang secara politis (pusat) dan sah (secara hukum) untuk pelibatan sumber daya sosial, budaya, ekonomi dan politik lokal. Dengan demikian diskursus harus juga melibatkan dimensi sosial (*social capital*) sebagai perbendaharaan dalam proses pembangunan yang mementingkan rakyat. Sejalan dengan ini, paling tidak empat komponen dapat menjadi pilihan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Pertama, pelibatan konsepsi lokal tentang status-status dan peran sosial yang ada dalam masyarakat. Kepemimpinan lokal di berbagai tempat telah terbentuk sebagai respons masyarakat atas tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama puluhan tahun. Kepemimpinan lokal di NTT terbukti mampu melestarikan hutan dan kayu cendana. Akibat pengingkaran status terhadap mereka dengan peralihan HPH menyebabkan kerugian yang sangat besar, terutama karena pencurian dan pembakaran hutan tidak ditabukan lagi akibat hilangnya pemimpin tradisional. Demikian juga status dan peran ulama di Aceh, Sumatera Barat, atau Madura yang berubah sejalan dengan proses formalisasi kepemimpinan yang kemudian hanya pemimpin formal yang dilegitimasi telah menyebabkan terganggunya sistem sosial masyarakat. Konflik yang muncul tidak lagi mudah diselesaikan karena otoritas yang baru tidak lagi mendapatkan legitimasi secara adat dan hukum setempat. Fakta ini juga yang kemudian menyebabkan kemudian hilangnya suatu struktur media dalam masyarakat yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Peralihan status unit-unit sosial terkecil ke sistem desa adalah contoh populer tentang bagaimana kerancuan dan konflik di dalam penataan sosial dalam komunitas terjadi. Contoh yang paling jelas adalah Sumatera Barat yang penghapusan Sistem Nagari juga telah menyebabkan rancunya konsep pemilik dan keterikatan sosial

(social attachment) penduduk ke dalam sistem klannya (lihat F dan K Benda-Beckmann 2001).

Kedua, pola pengaturan hak yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam struktur sosial masyarakat secara jelas terdapat pola-pola organisasi sosial yang mengatur hak-hak individu dan komunal yang berfungsi dengan baik. Hak-hak itu menyangkut hak individu dan hak komunal. Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak individu, seperti hak atas tanah berdasarkan prinsip-prinsip setempat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan hukum Islam, maka hak individu atas tanah diatur berdasarkan pembagian laki-laki dan perempuan. Pada tingkat komunal dikenal hak ulayat yang mengatur pemilikan dan menunjukkan bagaimana konsep komunalitas dibangun di dalam penataan sosial. Dalam banyak contoh, seperti juga dalam perkawinan, hukum negara berhadapan dengan hukum lokal yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda. Pemaksaan terhadap praktik hukum nasional tidak selamanya berhasil karena melahirkan berbagai bentuk resistensi dari masyarakat dan manipulasi praktik hukum itu sendiri. Kasus *carok* di Madura adalah contoh penting bagaimana kerancuan praktik hukum nasional dalam hubungannya dengan hukum keluarga dan komunitas (Wiyata 2001). Dalam pengaturan hak-hak dan pemilikan atas berbagai sumber daya sosial, ekonomi dan politik, konflik antara negara dan masyarakat telah menjadi bagian dari hakikat hubungan negara dan rakyat selama berabad-abad.

Ketiga, sistem akses dan kontrol yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda dengan sistem yang dibentuk oleh negara. Pola pengaturan akses yang berlaku dalam masyarakat cenderung bersifat terbuka dan komunal. Akses atas sumber daya dan tenaga kerja, misalnya didasarkan pada ide komunalisme. Demikian juga sistem kontrol lebih bersifat komunal. Perubahan terjadi ada saat dominasi negara semakin kuat dalam pengaturan akses dan kontrol, khususnya pada saat kebijakan negara telah memperjelas

ketimpangan sosial. Fakta yang paling mencolok selama orde baru, misalnya, adalah peleburan jurang sosial yang mana jarak antara kelas atas dengan kelas bawah semakin lebar. Hal ini dengan sendirinya telah menyebabkan akses publik terhadap berbagai pelayanan menjadi timpang dan mekanisme untuk menjembatani ketimpangan ini hampir tidak tersedia. Pembangunan yang berlangsung telah pula mematikan mekanisme lokal dalam pengaturan akses secara lebih terbuka atau yang mampu berfungsi dalam menjembatani hubungan atas dan bawah. Sistem pengerjaan lahan dengan sistem *maro* yang sangat populer di berbagai tempat atau panen dengan cara *bawon* merupakan mekanisme pembagian akses yang terbuka yang memungkinkan bagi yang tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan. Sejalan dengan ini gotong-royong yang berfungsi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya di berbagai daerah yang merupakan contoh yang jelas tentang adanya mekanisme lokal di dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Praktik kebijakan dalam banyak kasus telah menafikan keberadaan institusi lokal semacam ini yang turut menyebabkan kemusnahan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. dengan fakta semacam ini, diskursus desentralisasi juga harus berarti bahwa sifat-sifat dasar yang dimiliki daerah (lokal) harus mendapatkan artikulasi kepentingan kebijakan yang jelas.

Keempat, pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Musyawarah pada tingkat *Jurong* di Sumatera Barat atau *Gampong* di Aceh atau *Dusun* di Jawa menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan polisentrik. Pemimpin dalam sistem sosial semacam ini lebih merupakan “wakil” atau representasi anggota, bukan sebagai penguasa. Perubahan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi tidak berarti apa-apa jika konsep kepemimpinan dengan segala kekuasaannya tidak mengalami kontekstualisasi.

Sejalan dengan keempat pokok pikiran di atas, maka praktik pembangunan di Indonesia mensyaratkan adanya *political will* dalam membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi berbagai dimensi kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai-nilai, maupun dimensi simbolik dari kebudayaan daerah. Integrasi kekayaan lokal dalam keempat bentuk yang berdiri di atas kedaulatan rakyat dengan segala karakter dan sifat dari rakyat itu yang tampak dari ekspresi kebudayaannya.

Penutup: Menciptakan Tatanan Masyarakat Multikultural

Setidaknya terdapat dua garis besar, yang menyangkut cara menghadapi diversitas sebagai fakta sosial di Indonesia, yakni dengan menciptakan sebuah multikultural yang digerakkan oleh dua etnisitas yang saling berhubungan. Secara vertikal, yakni suatu upaya membangun konsep multikultural berdasarkan kesepakatan negara dan warganya secara adil, pembangunan berjalan tanpa harus mengorbankan entitas minoritas. UU otonomi daerah, No.2, 1998, merupakan pintu gerbang yang cukup baik untuk membangun pola multikulturalisme vertikal ini. Negara bersama UU Otonomi daerah 1999 dibutuhkan dalam hal ini karena (i) model pembangunan kita telah bergeser ke arah desentralisasi daerah, sehingga setiap wilayah dipacu untuk saling berkompetisi secara positif dan saling membuka diri; (ii) ide multikulturalisme dan munculnya otonomi daerah merupakan redefinisi atas sentralisasi sistem politik sebelumnya yang telah gagal; (iii) dalam hubungan vertikal, pemerintah tidak lagi menjadi *regulator* melainkan *fasilitator* dan *mediator* terhadap dibangunnya berbagai kebutuhan dasar warga dan ekspresi kebudayaan, tanpa memandang ia berasal dari etnis manapun. Sebagai fasilitator pemerintah wajib menjamin keadilan hukum, ruang politik, pendidikan, pekerjaan, asuransi, dan akses publik terhadap pasar. Secara horizontal, konsep multikulturalisme dibangun oleh

masyarakat melalui proses pembelajaran bersama. Bentuk hubungan ini membuka jalan bagi munculnya *civil society*, tanpa harus melibatkan kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down*. Ide multikulturalisme justru akan membuat pergerakan ekonomi semakin fleksibel, karena program pembangunan ekonomi tidak tersentralistik dalam satu tangan, yakni negara (Wieviorka 1998: 882 – 905; Suparlan 2001).

Pergeseran paradigma pembangunan dengan memberi ruang yang lebih luas bagi publik untuk partisipasi harus dimulai dengan kejelasan pendefinisian warga, terutama menyangkut status dan hak warga negara dalam suatu negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pelibatan warga dalam proses pembangunan yang dirumuskan dan diterapkan. Pilihan-pilihan nilai yang diambil dalam setiap tahap pembangunan haruslah menjamin harkat dan martabat manusia sebagai warga negara dari suatu bangsa yang berdaulat. Dengan kata lain, konsep pembangunan yang melibatkan rakyat yang diimpikan David Korten, akan menjadi mimpi belaka jika proses pembangunan tidak dilakukan dengan membuka ruang yang lebih luas bagi pluralitas budaya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Irwan. 2002. "Allah, Ubed S. *Politik Identitas. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesia Tera. (hal. 192 – 7).
- Abdullah, Amin. 2006. *Pendidikan Agama Era Multikultural, Multireligius*. seri Begawan Muhammadiyah. PSAP. (hal. 32 – 7).
- Aime Tourres, Marie. 2003. "The Politics of Multikulturalism". IAAS Newsletter. March Social Sciences. Calcutta. (hal. 34 – 6).
- Geertz, Clifford. (The Tanner Lecturer on Human values). "The Uses of Diversity". 253 – 275:1985. the, 2003.
- Appadurai, Arjun. 2003. *Modernity at Large. Cultural Dimentions of Globalizations*. Mnnesota. (hal. 129 – 157).
- Bagchi, Amiya Kumar, 2003. "The Past Development and The Future of the Development State". Journal of World-System Research. Vol. XI. No.2. Centre for Studies in University of Michigan. (hal. 398 – 436).
- Hadiz, Vedi and Dhakidae, Daniel Ed. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. ISEAS. Singapore. (hal. 91 – 106).
- Kudhori. *Neoliberalisme Menumpas Petani*. 2002. Resist Book. Yogyakarta. (hal. 111 – 121).
- Parson, Talcott. 1977. *Social System and The Evolution of Action Theory*The free Press. (hal. 43 – 6; 52 – 7).
- Rose, Martin and Melville, Caspar. July 2004. "Translating Difference: A Debate Abotu Multiculturalism". www.open democracy.net. (hal. P,1 – 4).
- Scott, James. 1998. *Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have failed*". Ch2. Cities, People, and Language. Yale University Press. (hal. 53 – 83).
- Spivak, Gayatri & Gunew Sneja. 1993. *Questions on Multiculturalism*. In Simon During Ed, *the Cultural Studies Reader*. Routledge. (hal. 193 – 202).
- Suparlan, Parsudi. 2001 "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komunitas dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*. (edisi Juli).
- 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". jurnal Antropologi Indonesia. 69. (hal. 98-105)
- Vermeulen, Hans and Slijper, Boris. 2000. "Multiculturalism and Culturalism. A Social scientific critique of the political philosophy of multiculturalism". (p.

- 7-32). Presented at the EURO Conference” Democracy Beyond the Nation-State: Perspectives on Post-National order, Athens, october 5 – 7, 2000.
- Vercovec, Steven. 2001. “Transnational Challenges to the ‘new’ Multiculturalism”. (p.1-23). Paper presented to the ASA Conference held at the University of sussex, 30 march – 2 april 2001.
- Wieviroka, Michel. 1998. *Is Multiculturalism the Solution*. 882 – 905: 1998. Ethnic and racial Studies Volume 21. Routledge.

MULTIKULTURALISME DALAM POLITIK: Sebuah Pengantar Diskusi

Nur A. Fadhil Lubis

Guru Besar Hukum Islam, IAIN Sumatera Utara

Abstract

This article shows the dilemmatic problems that have to answer by Indonesia. The dilemmatic problems are the existence of strong idealism of unity to pull the policies which ignore the variety and differentiation; on the other hand there are some sides that focus to the differentiation that make them want to let go from Indonesia. This article begins by adopted the realities that Indonesia's facing which are the increasing number of aspiration to ethnic revivalism movement. This movement cause by increasing the negative perception about the threat of foreign cultural wave and the other ethnic group. Besides, the authors also discuss how the dynamics of ethnic group happened and also the appearance of internal and external conflict as effect of that dynamic.

This article also discusses how cultural homogenization happens in global context from media mass and internet. What happen on all the dynamic process seen by the author as an interaction space, interpretation and cultural change that continuously happen and multi destination, but not happen in the same in the same intensity, there is "pressure" and "attraction" anywhere. The author discusses this process completely. It also discuss the strength of patrimonial with centralistic policy and hegemony power which mostly seen to expand ethnocentrism and shorten multiculturalism.

Keywords: *multiculturalism, globalization of culture, political culture, democratization*

PENDAHULUAN

Indonesia, tanah air kita tercinta ini, adalah sebuah negeri yang sangat heterogen. Bangsa Indonesia terdiri dari ras dan suku bangsa yang beragam, berbicara dalam bahasa dan dialek yang berbeda, serta hidup dalam budaya yang plural. Alam Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, memang juga beraneka ragam, terdiri dari ribuan pulau, terpisah oleh selat dan laut, dihuni oleh flora yang bermacam-macam serta ditumbuhi oleh fauna yang beraneka.

Namun dari sisi lain negeri dan bangsa ini adalah satu, diikat oleh suatu idealisme ingin bersatu. Sejarah telah membuktikan

segenap warga pernah terbuhal dalam semangat perjuangan ingin terlepas dari penjajahan, mau membangun suatu negara-bangsa yang berdaulat. Para perintis telah bersumpah menggalang persatuan, terutama dalam bahasa, bangsa, dan tanah air. Inilah riwayat negeri ini, suatu riwayat tarik-menarik, kisah pasang naik dan surut sebuah negara-bangsa. Terkadang faktor pengikat (*integrating factors*) lebih kuat dan pada waktu yang lain berbagai elemen pemecah (*disintegrating factors*) lebih dominan. Idealisme yang kuat untuk persatuan dan kesatuan bangsa terkadang mendorong pengambil kebijakan mengabaikan keragaman dan menekan keanekaan. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang terlalu memfokuskan

perbedaan, hingga ingin lepas dari ikatan ke-Indonesia-an.

Problema dilematis inilah yang harus dijawab negara dan bangsa ini. Menundanya hanya akan menambah daya ledaknya di kemudian hari. Upaya menjawabnya telah pernah dilakukan dari berbagai sudut. Berbagai ilmu dan disiplin telah digunakan untuk meneropong permasalahan ini. Namun jarang terdengar melihatnya dari sisi budaya itu sendiri. Di sinilah barangkali forum ini menjadi begitu penting dan strategis. Makalah ini hanya sebuah sumbangan kecil dalam urun-rembug tersebut.

MANUSIA DAN BUDAYA

Manusia adalah makhluk sosial (*social being, zoon politicon, madaniyy bi al-thab*), hingga merupakan instink dasar bagi anak-cucu Adam-Hawa untuk memerlukan orang lain. Hubungan seorang individu dengan manusia lain membentuk jaringan yang berlapis dan tumpang tindih. Seseorang merupakan bagian dari keluarga inti (*nuclear family*), anggota keluarga besar (*extended family*), kelompok marga, klub olahraga, asosiasi profesi, warga kampung, kelompok hobi, pelanggan listrik, anggota partai politik, pemirsa televisi, anak Medan, warga Sumatera Utara, bangsa Indonesia, anggota agama samawi, bagian dari negara berkembang, hingga anggota dari spesies homo sapiens.

Jika konsep masyarakat merujuk jenis kelompok tertentu, maka ciri paling mendasar terkait dengan hubungan (*relationship*) antar-manusia. Hubungan dapat dibedakan berdasarkan berbagai landasan yang berbeda. Contohnya, di kalangan ilmu sosial sering dibedakan antara kelompok primer dan kelompok sekunder berdasarkan derajat keintiman hubungan antar-warganya. Kedekatan dan keintiman ini terkait erat dengan konsep identitas. Apakah yang dianggap seseorang merupakan identitas utamanya, apakah marga, etnis, kelas, agama, atau yang lain?

Namun identitas dan peranan seseorang biasanya bersifat kontekstual dan

relatif, dalam artian banyak ditentukan oleh konteks situasi-kondisi yang mengelilingi serta dalam hubungan dengan siapakah proses identifikasi itu terjadi. Ini bisa dijelaskan dengan mengambil perumpamaan pertandingan kompetisi sepakbola. Ketika tingkat lorong (RT/RW), maka semua warga lorongnya menjadi *in-group*, dan yang tidak merupakan *out-group*. Jika minggu berikutnya meningkat pertandingan sepakbola tingkat antar kampung, semua warga kampung, termasuk warga lorong yang menjadi lawan kemaren, menjadi bagian dari *in-group*, dan kampung lain jadi lawan. Jika minggu berikutnya kesebelasan yang menang mewakili kecamatan, maka seluruh warga kecamatan bersatu melawan kecamatan lain. Begitulah berikutnya, hingga semua warga Sumatera Utara menjadi *solider* bersatu ketika PSMS melawan PERSIJA. Suasana tentu berbeda ketika Indonesia berjuang di tingkat ASIA atau bahkan Olympiade.

Jika identitas kelompok dan budaya itu kelihatannya begitu kontekstual dan relatif, maka apakah yang biasanya terjadi jika terjadi interaksi antara dua etnis, kelompok budaya yang berbeda? Sebelumnya patut dikemukakan bahwa kontak antar-etnis dan budaya selamanya terjadi dua arah, meskipun yang satu datang sebagai penguasa atau penakluk sekalipun. Kita membaca sejarah betapa bangsa Belanda hingga saat ini masih terpengaruh oleh banyak budaya bangsa Indonesia, meskipun mereka tercatat sebagai menjajah negeri ini begitu lama. Namun demikian ada beberapa dampak dari kontak antar-etnis dan budaya ini.

Ketika orang dalam suatu kelompok etnis dan budaya menyadari cara hidup dan adat-istiadat warisan leluhur sedang terancam punah oleh masuknya gelombang budaya asing dan kelompok etnis luar, banyak pihak dari etnis yang terancam itu bersikap dan berprilaku *nativism*, upaya keras dan menyeluruh untuk melestarikan, bahkan menghidupkan kembali, budaya leluhur dan tradisi mapan. Bertambah kuat persepsi terhadap ancaman itu, bertambah kuat aspirasi untuk *ethnic revivalism* ini. Untuk ini patut dicermati hasil penelitian betapa keturunan orang-orang Jawa yang bermigrasi

ke Suriname ternyata lebih keras melestarikan budaya Jawa daripada orang Jawa yang bertahan mukim di pulau Jawa. Mereka begitu heran, mengapa orang Jawa di Jawa sudah tidak berbudaya “Jawa” lagi.

MULTIKULTURALISME

Para ilmuwan sosial biasanya mempergunakan konsep masyarakat (*society*) untuk mengidentifikasi orang sesuai dengan hubungan mereka satu sama lain dan keindependenan mereka dari yang lain, sedangkan konsep budaya (*culture*) untuk mengidentifikasi orang sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui, dan bagaimana mereka bertindak. Ringkasnya, seluruh yang dipelajari manusia adalah kultur.

Setiap manusia mesti mempelajari kultur masyarakatnya. Di antara unsur budaya yang paling signifikan yang harus dipelajari seseorang adalah nilai (*values*), norma (*norms*) dan peranan (*roles*). Nilai-nilai sebuah kultur mengidentifikasi yang dianggap ideal – tujuan paling tinggi dan standar paling umum untuk memastikan baik dan buruk atau yang disukai dan yang dibenci.

Norma, sebaliknya, cukup spesifik. Ia merupakan kaidah yang mengatur perilaku (*rules governing behavior*). Norma menetapkan perilaku yang diperlukan, yang dapat diterima, atau yang dilarang dalam keadaan tertentu. Norma mengidentifikasikan bahwa seseorang seharusnya, seyogianya, atau semestinya bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara tertentu. Nilai dan norma saling terkait. Nilai membenarkan norma. Contohnya, nilai harga diri manusia dapat dikemukakan untuk menjelaskan norma melarang mencemoohkan orang yang cacat tubuh. Memanggil dengan julukan yang terkait dengan cacat fisiknya bukan saja melanggar norma, tetapi juga secara moral salah.

Sedangkan peranan (*role*) adalah kumpulan norma yang terkait dengan kedudukan tertentu dalam suatu masyarakat. Ini berarti norma-norma ini menjelaskan

bagaimana kita mengharapkan seseorang dalam kedudukan tertentu berbuat atau tidak berbuat. Struktur sosial ditata oleh peranan. Dalam setiap situasi sosial, kita memiliki peranan yang relatif jelas untuk dijalankan: mahasiswa, teman, perempuan, suami, pejalan kaki, polisi, perawat, isteri, dan lain-lain. Masing-masing peranan ini melibatkan adanya suatu “scenario” yang diharapkan masing pemilik peran untuk mengikutinya.

Apa yang diuraikan ini, baik kultur maupun struktur sosial, setiap masyarakat, meskipun secepat seperti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, meskipun terkesan sebagai tradisi yang mapan, sebenarnya adalah lembaga yang dinamis dan terus berkembang. Tidak ada masyarakat dan budaya yang tidak berubah, perbedaannya hanya dari sisi intensitas dan kecepatannya. Perubahan bisa terjadi karena faktor-faktor internal, atau disebabkan unsur-unsur eksternal, atau gabungan dari keduanya.

Berbagai perubahan ini bisa menimbulkan konflik, baik konflik internal antar-warga dalam sebuah etnis, maupun antara suatu etnis dengan pihak lain. Konflik internal yang dihadapi hampir semua etnis di Indonesia, umpamanya, adalah berlapisnya, atau terkadang bersaingnya, norma-norma yang ada secara bersamaan. Seorang warga terkadang terperangkap dalam situasi di mana ia harus memilih antara norma hukum (nasional), norma adat dan norma agama. Permasalahan menjadi meluas ketika seseorang melakukan migrasi keluar dari teritorial etnisnya, dan bergabung dalam masyarakat multi-etnis, hingga ia harus berinteraksi dengan etnis lain yang kemungkinan memiliki kebiasaan, adat, budaya dan agama yang berbeda. Bahkan suatu teritorial yang dulunya dimiliki satu etnis, malah bisa saja etnis itu menjadi minoritas di wilayah tersebut.

Sebagaimana disimpulkan oleh Emile Durkheim (1858 – 1917), masyarakat adalah “*before all else is an active cooperation*” (yang paling utama adalah kerja sama aktif). Kesadaran kolektif, yang dibangun di atas sentimen dan kepercayaan bersama,

membutuhkan tindakan bersama. Praduga dan diskriminasi merusak kebersamaan keyakinan dan tindakan ini. Oleh karenanya sikap dan bentuk interaksi apakah yang selayaknya dikembangkan bagi hubungan antar-etnis dalam masyarakat multi-etnis seperti masyarakat Sumatera Utara, terlebih-lebih kota Medan.

Upaya segregatif dan apartheid barangkali sudah sulit dipertahankan di tengah derasnya ombak mobilitas demografi dan kancangnya gelombang globalisasi, di samping juga kelihatannya bertentangan dengan etika-moral yang luhur. Sikap ini biasanya terkait erat dengan paham *ethnocentrism* (etnosentrisme), bahwa segalanya diukur dan dihakimi menurut nilai dan ukuran etnisnya sendiri. Meskipun mungkin didorong oleh niat ikhlas, kolonialis Barat dahulu juga memiliki misi suci untuk mengadabkan (*civilizing mission*) bangsa-bangsa Timur yang “*uncivilized*” (biadab), tentunya menurut nilai dan ukuran peradaban Barat.

Paham *ethnocentrism*, dengan berbagai nama dan julukan biasanya menumbuhkan prasangka (*prejudice*) dan stereotip (*stereotype*) dalam dan antar-warga, hingga mendorong meningkatnya sikap dan perilaku negatif. Prasangka adalah sikap dan perbuatan memutuskan seseorang atau sekelompok orang tanpa didukung oleh data yang memadai. Tanpa menyelidiki terlebih dahulu, seseorang langsung kita cap “pelit” atau “malas” hanya karena ia berasal dari kelompok etnis tertentu. Sedangkan stereotip adalah pembengkakan suatu temuan terbatas hingga menggeneralisasi semua anggota kelompoknya. Contohnya, kita menemukan dua-tiga warga etnis tertentu “tidak bisa dipercaya”, kita menyimpulkan semua etnis tersebut tidak bisa dipercaya.

Jika prasangka dan stereotip lebih merupakan sikap (*attitudes*), tetapi diskriminasi dan kekerasan (*violence*) sudah diwujudkan dalam perbuatan. Meskipun diskriminasi bisa terjadi tanpa dilandasi sikap prasangka dan stereotip, namun hubungan keduanya begitu erat. Akibat seorang atasan berprasangka bahwa warga etnis tertentu tidak bisa dipercaya, maka ia

tidak pernah mempromosikan pegawainya dari etnis tersebut untuk jabatan-jabatan tertentu.

Jika praduga merupakan sikap yang diperpegangi oleh individu atau kelompok, maka diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak harus mengimplikasikan praduga, tetapi mungkin berasal darinya. Praduga merefleksikan sentimen yang mungkin dimiliki hanya beberapa individu, tetapi diskriminasi terkait dengan praktik umum dalam struktur sosial sebuah kultur. Seseorang mungkin memiliki praduga dan tidak pernah menterjemahkannya dalam tindakan yang diskriminatif. Praduga dan diskriminasi dapat saja terpisah satu sama lain, namun hubungan keduanya biasanya sangat erat.

Apa yang mendorong orang untuk memiliki sikap yang penuh praduga dan melakukan tindakan brutal terhadap orang lain, hanya karena orang lain itu warga kelompok tertentu? Dalam kepribadian orang-orang yang menunjukkan praduga yang mendala, Allport, menemukan *a core of insecurity* (inti ketidak-amanan). Ketika faktor-faktor psikologis diiringi oleh faktor-faktor ekonomi – seperti ketika suatu kelompok yang menderita diskriminasi kultural juga memiliki kekayaan yang diinginkan pihak lain, maka suasana mudah sekali meledak menjadi konflik terbuka.

Untuk membendung dan mengalihkan gelombang etnosentrisme ini, dikembangkanlah kemudian paham multikulturalisme dan pluralisme. Kedua istilah ini sering dipertukarkan, meskipun di antara keduanya ada nuansa yang berbeda. Multikulturalisme adalah sikap dan paham yang menerima adanya berbagai kelompok manusia yang memiliki kultur dan struktur yang berbeda. Perbedaan ini bukan merupakan ancaman atas keberadaannya baik sebagai individu maupun kelompok, meskipun bukan berarti ia mau mengadopsi dan menganggap kultur pihak lain itu sama baiknya dengan kultur etnisnya sendiri. Sedangkan pluralisme lebih menunjukkan kesediaan untuk menerima dan terbuka terhadap etnis dan budaya lain, dan etnis dan

budaya lain itu bisa bernilai baik, paling tidak untuk warganya.

Pluralisme biasanya dipilah antara yang bersifat normatif, yang merupakan ketetapan penguasa, yang erat kaitannya dengan pluralisme politis, yang menjamin adanya kebebasan untuk membentuk organisasi dan menyatakan pendapat. Namun yang lebih terkait dengan perbincangan kita adalah pluralisme kultural dan struktural. Pluralisme budaya adalah kesediaan dan keterbukaan semua pihak akan adanya keragaman budaya dan berupaya sebisanya agar setiap etnis dan budaya memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Untuk ini perlu dukungan struktur sosial yang bukan saja kondusif tetapi mendukung terlaksananya masyarakat multi-etnis.

Jadi apakah yang dimaksud dengan multikulturalisme itu? Sekedar memberi gambaran, berikut ini dikutipkan sebuah definisi yang diambil dari apa yang dimaksud dengan “*multicultural education*” sekedar bandingan:

*Multicultural education is a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal educational opportunities for students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups. One of its important goals is to help all students to acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with peoples from diverse groups in order to create a civic and moral community that works for the common good.*¹

GLOBALISASI KULTUR

Jauh sebelum isu globalisasi muncul sebagai topik populer di media massa, para pakar

antropologi, seperti B. Malinowski (1884 – 1942) dan A. R. Radcliffe-Brown (1881 – 1955) telah memasukkannya dalam obyek kajian mereka. Mereka mengkaji “bentrokkan cultural” ketika peradaban Barat-Eropah merasuk ke dalam kultur di kawasan jajahan mereka.

Peristiwa kontrak budaya ini menimbulkan dua jenis tanggapan ideologis yang berlawanan di kalangan pakar. Sebagian masuk penganut “relativisme cultural” yang memandang kondisi ini sebagai imperialisme budaya yang menimbulkan bencana besar, terutama musnahnya banyak kultur pribumi, hilangnya otonomi budaya lokal serta teralienasinya komunitas asli.

Pandangan lain lebih sejalan dengan gagasan umumnya penguasa kolonial dan sebagian *missionaries* asing yang berbau etnosentrisme. Mereka menyatakan bahwa kenyataan tak terbantahkan bahwa peradaban Barat telah lebih dahulu berhasil maju, hingga tugas mereka untuk juga memajukan bangsa-bangsa lain, memerangi barbarisme, menceraikan kaum biadab dan membasmi kebiasaan yang “primitif”.

Setelah Perang Dunia II, ketika banyak negeri yang dulunya terjajah memproklamasikan kemerdekaannya, ketergantungan kultural dan imperialisme budaya ini tidak berhenti, malah diteruskan oleh pemerintahan negeri-negeri baru ini dengan program “pembangunan” yang lebih merupakan “westernisasi”. Berbagai sistem kultur negara berkembang telah mengalami proses “penyelarasan cultural”.²

Hal ini lebih diperparah lagi dengan tumbuh-berkembangnya komersialisasi dan dijadikannya entitas kultural lebih sebagai komoditas bagi pajangan dan hiburan pengunjung dan wisatawan. Pemolesan dan improvisasi akhirnya dilakukan bukan berdasarkan apresiasi budaya tempatan, tetapi lebih untuk memuaskan selera pendatang.

Dalam periode belakangan ini, homogenisasi kultur pada skala global

¹ Definisi dapat dilihat dalam website “Multicultural Education” <http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs>. Lihat juga makalah penulis dalam Dialog Antar Perguruan Tinggi.

² Uraian lebih lanjut, baca Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2004), terutama 108 – 112.

umumnya ditampilkan melalui saluran media massa terutama televisi dan lebih belakangan lagi, melalui internet. “Imperialisme media”, Sztompka menegaskan, kian mengubah dunia menjadi “*global village*” (dusun buana), di mana lingkup pengalaman kultural dan produknya pada dasarnya sama. Pakar lain memberi nama produk budaya global ini dengan istilah *ecumene culture*. Yang dimaksudkan di sini adalah kian terbukanya kawasan interaksi, interpenetrasi dan pertukaran kultural yang berlangsung terus menerus dan multi-arah.

Namun demikian, arus multi-arah tersebut tidak terjadi dalam intensitas yang sama. Pesan, terkadang tekanan dan tarikan, kultural dari inti (*core*), dalam artian negara-negara maju, lebih kuat mengalir ke wilayah pinggiran (*periphery*) ketimbang sebaliknya. Yang dari inti ke pinggiran mulai dari produk ilmiah canggih hingga mode busana. Sedangkan yang dari pinggiran ke inti hanya beberapa, contohnya musik Afrika dan novel Amerika Latin. Itupun setelah dipoles menjadi komoditas dan dipasarkan oleh kalangan inti. Persis seperti mereka memberi bahan mentah CPO (*crude palm oil*), kemudian diolah di wilayah inti dan kemudian dijual kembali dalam bentuk produk kosmetika dan lain-lain. Hannerz dan beberapa pakar lain memperkirakan empat kemungkinan dari perkembangan globalisasi kultural ini di masa mendatang. Pertama, *homogenisasi*, hingga kultur Barat akan mendominasi seluruh dunia. Kedua, *kejenuhan*, masyarakat pinggiran akan mengalami kejenuhan dan kemungkinan besar menimbulkan efek arus balik. Ketiga, kerusakan dan pembusukan budaya. Hal ini terjadi karena budaya Barat yang mengalir dan diterima di masyarakat berkembang umumnya “budaya sempalan” (*splitter culture*) dan budaya tandingan (*counter culture*) dari wilayah inti, bukan budaya canggih dari kalangan *mainstream*. Yang ditonton adalah film *Baywatch*, bukan karya Shakespeare, musik rap, hip-hop ketimbang Beethoven. Buku komik picisan dan pornografis ketimbang literatur ilmiah dan filosofis.

Dalam bidang pemerintahan dan perpolitikan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia memang mendapat pasaran dan dicanangkan. Tetapi kenyataannya tidak seperti adanya di negeri asalnya. Kebebasan menjadi kebablasan, hak-hak asasi malah dipakai, atau disalahpakai, untuk membela yang salah, kebebasan berbicara berubah jadi pertikaian publik. Lelucon di Barat menjadi serius di Timur.

Kemungkinan keempat adalah kedewasaan. Penerimaan kultur Barat melalui dialog dan pertukaran yang lebih seimbang. Aspek-aspek kultural ditapis secara selektif, yang berharga diambil, yang sampah dibuang. Praktik “*cultural dumping*” dihindarkan. Masyarakat penerima dicerahkan dan diberdayakan untuk melakukan interpretasi lokal, improvisasi tempatan yang lebih tepat untuk kondisi setempat. Inilah yang disebut peleburan, amalgamasi atau pencangkakan budaya hingga melahirkan *cultural hybrid* yang lebih unggul.

Kemungkinan yang manakah, dari yang empat ini, telah, sedang, dan akan terjadi di Indonesia? Atau, apa yang terjadi di Indonesia tidak tercakup dalam kerangka teoretis di atas, hingga memerlukan kerangka teori baru?

BUDAYA POLITIK ORDE BARU

Berbicara tentang budaya politik yang sekarang sedang berkembang tidak akan lengkap jika tidak didahului dengan perbincangan tentang apa yang terjadi selama Orde Baru yang selama tiga puluh tahun lebih telah mempengaruhi dan membentuk hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang politik dan budaya.

Seorang peneliti-pemerhati tentang perkembangan Indonesia terutama setelah Reformasi menyimpulkannya dalam sebuah “frasa” yang menjadi judul artikelnya ‘Belum Stabil’.³ Ini menunjukkan betapa kita,

³ Lihat Patricia Spyer. “Belum Stabil: Some Signs of the Times in Post-Soeharto Indonesia.” dalam Hanneman Samuel & Henk Schulte Nordholt (eds.). *Indonesia in*

termasuk para ilmuwan-peneliti, masih sering mempergunakan terminologi, landasan konseptual dan kerangka teoretis dari era Orde Baru ketika membahas dan mengulas apa yang terjadi setelah rezim itu dirubuhkan. “Stabilitas” adalah istilah yang dipopulerkan rezim Soeharto, dan itu sesuatu yang baik dan harus dipertahankan, betapapun bobrok, diskriminatif dan destruktif sistem yang ada. Kata “belum” (*not yet*) dalam bahasa Indonesia mengandung konotasi akan atau diharapkan akan terjadi. Apalagi anak judul artikel memang masih menamakan masa setelah Reformasi sebagai *post-Soeharto* (pasca-Soeharto) menunjukkan betapa masih signifikannya tokoh ini.

Setelah 1966, Orde Baru secara perlahan tapi pasti memantapkan eksistensinya, fokus penelitian akademis pada waktu itu beralih dari ketegangan antara proses *nation-building* dan keterikatan primordial – yang menekankan pentingnya loyalitas lokal yang diungkapkan dalam pengertian kekeluargaan, komunitas religius, bahasa dan adat-kebiasaan – dan hampir secara eksklusif tertumpu pada hakikat negara. Dalam sebuah esai yang berpengaruh Harry Benda telah mengkarakterisir negara kolonial akhir Hindia Belanda sebagai *beamttenstaat*.⁴ Dibangun dalam kerangka teoretis Weberian, negara ini dipandang sebagai *apolitical administrative polity* yang dijalankan oleh para pegawai Belanda dan “elit pribumi” – tetapi dengan kontrol ketat Belanda yang menekankan pemerintahan yang baik dan terpusat. Ini merupakan negara yang mementingkan pemerintahan yang modern dan efisien.

Disebabkan oleh tumbuhnya negara Orde Baru yang kuat, kelompok-kelompok besar dalam masyarakat menjadi tersingkir dari berpartisipasi dalam domain politik, yang dibatasi oleh faksi-faksi yang bersaing dalam sebuah elite politik yang kecil. Harold Crouch⁵

berargumentasi bahwa Orde Baru harus dilihat sebagai sebuah *a patrimonial cum military regime* yang di dalamnya ikatan patron-klien mempersatukan negara, meskipun ia memandang adanya suatu proses bertahap ke arah pembuatan kebijakan yang rasional. Meskipun demikian, terdapat konsensus kuat di kalangan pengamat tentang sifat patrimonial dari negara pada waktu itu.

Memodifikasi pendekatan (neo) patrimonial, Dwight King pada 1982 meluncurkan konsep *a bureaucratic authoritarian regime* yang ditandai oleh tingkat korporatisme yang tinggi.⁶ Sebagai ganti dari ikatan patron-klien individual, berbagai kelompok dalam negara, juga dalam masyarakat, terikat secara kolektif pada para pemimpin negara. Selain dari efek pendisiplinan dari dimasukkannya kelompok-kelompok ini, menurut King, terdapat juga sedikit kemungkinan bagi representasi kepentingan ke atas.

Orde Baru, tentu saja, bukan suatu fenomena yang statis, tetapi secara bertahap berkembang menjadi *a relatively hegemonic regime*.⁷ Selain dari konsensus luas tentang sifat (neo) patrimonial *cum corporatist* dari gaya pemerintahan Orde Baru, para pakar juga menyepakati kuatnya negara dan otonominya berhadapan dengan rakyat dan masyarakat.

Ruth McVey dan Benedict Anderson memperkenalkan dalam kaitan ini suatu perspektif historis perbandingan. McVey⁸ mengambil gagasan Benda tentang *beambtenstaat* sebagai titik bertolak ketika ia

Transition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁴ Baca Harry Benda. “The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia.” *Journal of Asian Studies* (1966) 42:477 – 496.

⁵ Baca Harold Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia.” *World Politics* 31 (1979): 571 – 587.

⁶ Baca Dwight King. “Indonesia’s new order as a bureaucratic polity, a neo-patrimonial regime or bureaucratic authoritarian regime: What difference does it make?” dalam B. Anderson & A. Kahin (eds.). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate* (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1982).

⁷ Baca tulisan bersama Mackie and MacIntyre. “Politics” dalam H. Hill (ed.). *Indonesia’s New Order: The Dynamics of Socio-economic Transformation* (St. Leonard: Allen and Unwin, 1994).

⁸ Baca R. McVey. “The beambtenstaat in Indonesia.” dalam B. Anderson and A. Kahin (eds.). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate* (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1982).

memperbandingkan negara kolonial akhir dengan Orde Baru. Meskipun negara kolonial pada dasarnya dijalankan oleh pegawai negeri (*ambtenaaren*) dan Orde Baru utamanya oleh militer, kesamaannya begitu kentara karena kedua rezim tersebut didasarkan atas kekerasan, demobilisasi politis dan pendekatan teknokratis terhadap modernisasi masyarakat.

Kesinambungan dari negara kolonial akhir ke rezim Orde Baru dielaborasi lebih jauh dalam artikel yang paradigmatis oleh Ben Anderson.⁹ Merujuk ke buku *Old Society, New State* yang diedit oleh Geertz pada 1963 (yang di dalamnya “sentimen primordial” ditekankan), Anderson memberikan judul terbalik untuk tulisannya tersebut “*Old State, New Society*” (negara lama, masyarakat baru) karena ia mendapatkan asal-usul Orde Baru pada negara kolonial akhir. Ini tidak lagi masyarakat, tetapi negaralah yang penting.

Dengan menekankan otonomi negara *qua* negara, Anderson menilik isu ini dengan perspektif Marxist yang memandang negara sebagai alat bagi kapital internasional dan borjuis penguasa. Baik McVey dan Anderson memperkuat kecenderungan di kalangan pemerhati Indonesia untuk mengkonseptualkan negara sebagai tercerabut dari masyarakat. Karena negara semakin kuat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kajian-kajian tentang Indonesia pada dasarnya terfokus pada rezim Orde Baru dan pusatnya, Jakarta. Sedikit sekali perhatian, apalagi penelitian, terhadap wilayah “pinggiran”.

Mengkritik para ilmuwan yang mengkaji Indonesia dari perspektif Weberian yang ketat, Richard Robison¹⁰ merintis pada 1980-an suatu pendekatan ekonomi politik. Indonesia diletakkan dalam konteks aliran kapital internasional, tetapi kekuatan dan otonomi relatif negara tidak dapat diabaikan. Akibat hilangnya borjuis pribumi yang kuat,

Robison mencari lokasi asal-usul dari kapitalisme baru dalam birokrasi, yang dibiayai oleh pendapatan minyak dan bantuan internasional, sedangkan kelas kapitalis yang kecil dan dependen beroperasi di luar negara. Konsep *authoritarian-bureaucratic-capitalism* dimunculkan yang di dalamnya negara menjadi tokoh penting.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi telah memfasilitasi birokrat kapitalis menjadi lebih bebas dari negara, dan mempercepat juga terbentuknya kelas kapitalis domestik terutama dari kalangan warga keturunan Cina. Secara paradoks jatuhnya harga minyak pada 1980-an merusak posisi monopolistik dari negara hingga diperlukan diversifikasi ekonomi, yang membuka kemungkinan bagi kelompok-kelompok baru masuk ke pasar. Sebaliknya Jeffrey Winters¹¹ telah mempertanyakan besaran aktual dari kelas kapitalis baru ini. Andrew MacIntyre¹² berpendapat perubahan fundamental memang benar-benar terjadi dalam ekonomi Indonesia. Mengelaborasi baik sifat korporatis dari rezim yang diusulkan King dan pendekatan ekonomi politik, MacIntyre menunjukkan bahwa sejak akhir 1980-an seterusnya kelompok *entrepreneur* pribumi telah bangkit dan berkembang yang beroperasi di luar negara dalam basis yang relatif cukup otonom.

Mengakui kesuksesan ekonominya, kebanyakan penulis menamakan Orde Baru sebagai *an authoritarian interventionist developmental state*. Selama Soeharto mampu mengelola keseimbangan antara berbagai kelompok yang bersaing, memberikan perhatian khusus pada orang-orang “*high tech*” pada masa-masa makmur, dan mendorong para teknokrat ke tengah gelanggang pada waktu krisis, ekonomi Indonesia dan rezimnya memberikan kinerja yang “bagus” dalam pengertian pertumbuhan, manajemen krisis dan stabilitas.

⁹ Baca Benedict Anderson. “Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective.” *Journal of Asian Studies* (1983), 42: 477 – 496.

¹⁰ Richard Robison. “Authoritarian states, capital-owning classes, and the politics of newly industrializing countries: the case of Indonesia.” *World Politics* (1988) 61: 52 – 74.

¹¹ Baca artikel J. Winters. “Indonesia: the Rise of Capital: A Review Essay.” *Indonesia* (1988) 45: 109 – 128.

¹² A. MacIntyre. *Business and Politics in Indonesia* (St. Leonard: Allen and Unwin, 1991).

Dibuktikan oleh kejayaan ekonominya, banyak pengamat cenderung mengkonseptualkan Orde Baru dalam pengertian seperangkat pranata yang terpadu yang beroperasi terpisah dari masyarakat dan yang memfasilitasi pertumbuhan bertahap dari ekonomi pasar yang relatif bebas. Ternyata apa yang disebut puncak-puncak kesuksesan Soeharto dan rezimnya, ternyata merupakan bibit kegagalan yang pada waktunya menggerogoti dan meruntuhkan rezim tersebut.

Yang mungkin patut didiskusikan dalam situasi Orde Baru sebagaimana digambarkan oleh para pengamat di atas, pola budaya politik dan politik budaya yang macam apakah yang berkembang? Kuatnya patrimonialisme dan konsumerisme cenderung menyuburkan etnosentrisme dan mengerdilkan multi-kulturalisme. Kuatnya negara serta kebijakan sentralistis serta hegemoni kekuasaan sama sekali bukan ladang subur bagi tumbuhnya sikap toleran dan multikulturalisme.

DEMOKRATISASI: REFORMASI BUDAYA POLITIK

Setelah krisis moneter dan politis pada 1997 – 1998, yang diikuti oleh periode yang dikenal sebagai “Reformasi”, Indonesia dipandang oleh para pengamat sebagai telah memasuki fase transisional dari pemerintahan otoritarian oleh *strong state* ke arah sistem pemerintahan yang lebih demokratis yang di dalamnya *civil society* akan memainkan peranan yang lebih besar. Transisi ini, selanjutnya, diikuti dengan proses desentralisasi yang menekankan otonomi regional dan mendekatkan kedaulatan kepada rakyat di samping membuat pemerintah menjadi lebih transparan.

Beberapa pakar lain tidak sependapat dengan paham yang terlalu optimistis di atas. Apa yang terjadi adalah transisi dari “*order*”, suatu tatanan yang teratur, kepada “*disorder*”, ketidakteraturan dan kekacauan. Setelah tiga dasawarsa lebih di bawah penguasa yang sentralistis dan otoriter, upaya untuk memperkenalkan perubahan politik, ekonomi

dan hukum tampaknya mengarah pada kegagalan akibat utamanya sabotase birokrat, sistem yang korup dan oportuniste jangka pendek yang merajalela, di samping tidak adanya visi masa depan yang diperpegangi bersama. Seorang penulis-pengamat asing tentang Indonesia, setelah melihat krisis dan reformasi bergulir, menggambarkan – sekaligus judul dan kesimpulan, tulisannya – sebagai negeri yang “Macet Total”.¹³

Dalam suasana yang seperti ini, adalah suatu prestasi yang cukup membanggakan negara-bangsa Indonesia mampu melewati hari-hari ujian berat menapaki proses demokratisasi. Pemilu legislatif telah berhasil dilaksanakan, meskipun kualitas lembaga ini masih jauh dari yang diharapkan. Pemilu Presiden sudah sukses dilakukan, meskipun produknya mungkin belum memuaskan semua pihak. Pilkada sudah dimulai dan proses otonomisasi wilayah juga telah menunjukkan hasil dan dampaknya, baik positif maupun negatif.

Dalam kondisi “*in-progress*” seperti ini wajar dan perlu semua pihak mengadakan refleksi dan evaluasi dalam rangka terus melakukan perbaikan dalam perjuangan berkesinambungan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

CATATAN AKHIR

Para pendiri negara-bangsa ini telah menyadari keanekaragaman bangsa ini dari banyak aspek, dan sangat bijaksana mereka memilih motto “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang negara. Bangsa ini telah belajar banyak dari perjalanan sejarah, karena *history is the best teacher*, bahwa keragaman yang ditekan atau ditindas, atas nama apapun, ternyata pada saatnya akan berakibat destruktif bagi masyarakat itu sendiri. Sikap etno-sentris yang dibumbui prasangka dan *stereotyping* tidak akan memperkuat faktor-faktor pemersatu suatu negara-bangsa, malah memperbesar hal-hal yang bisa mendorong negeri ini menjadi terpilah-pilah.

¹³ Lihat artikel Sidel J. “Macet Total: Logistics of Circulation and Accumulation in the Demise of Indonesia’s New Order.” *Indonesia*, 66 (1998): 159 – 194.

Yang lebih bijaksana dan tepat adalah sikap multikulturalisme, toleran dan menghargai budaya lain. Setiap warga dan seluruh komponen masyarakat harus sama membina kesepakatan serta menghargai berbagai keragaman. Multikulturalisme adalah sesuatu yang penting bagi langgeng dan berkesinambungnya proses reformasi dan upaya demokratisasi yang sedang dijalani bangsa Indonesia sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Aleinikoff, T. Alexander. (1998) 9/36. "A Multicultural Nationalism?" dalam *The American Prospect*, dapat dibaca dalam <http://www.prospect.org/print-friendly/print/V9/36/aleinikoff-t.html>.
- Anderson, B. & Kahin A. (eds). 1982. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate* (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project.).
- Anderson, B. 1983. "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective." *Journal of Asian Studies* (42: 477 – 496).
- Aspinal, E & Fealy, G. (eds). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Benda, H. 1966. "The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia." *Journal of Asian Studies* (25: 589 – 605).
- Crouch, H. 1979. "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia." *World Politics* (hal. 31: 571 – 587).
- Lubis, Nur A. Fadhil. 2006. *Pembinaan Keagamaan pada Perguruan Tinggi dalam Perspektif Multikultural* (Makalah pada acara Silaturahmi dan Dialog Kerukunan Hidup Umat Beragama Antar Perguruan Tinggi di Medan pada 7 Januari 2006).
- MacIntyre, A. 1991. *Business and Politics in Indonesia* (St. Leonards: Allen and Unwin).
- Robison, R. 1988. "Authoritarian States, Capital-Owning Classes, and the Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia." *World Politics* (hal.61: 52-74).
- Samuel, Hanneman & Nordholt, Henk Schulte (eds). 2004. *Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society', 'Region', and 'Crisis'* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sidel, J. "Macet Total: Logistics of Circulation and Accumulation in the Demise of Indonesia's New Order". *Indonesia* 66: 159 – 194.
- Sztompka, Piotr. 2004. *The Sociology of Social Change*. Terj. Alimandan. *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media).
- Winters, J. 1988. "Indonesia: the Rise of Capital: A Review Essay." *Indonesia* (hal. 45: 109 – 128).

MULTIKULTURALISME DALAM BIDANG SOSIAL

Ahmad Rivai Harahap

Sekretaris KPA

Abstract

This article briefly compares multiculturalism with melting pot and salad bowl theory which is done in USA and explains how multiculturalism corrects the weakness on both that theories. The author limited his discussions on Indonesian multiculturalism in organizing the plural life of Indonesian society. This article focused these description of how to made a good interaction among Indonesian people which have different culture and abroad too. Some social problems was take to make this case clear, mostly connected with the problems of education, culture, religion and another problems.

According with the focus of this article, the author discusses multiculturalism on social side which direct display both of public and private space. Public space surrounds scope of every citizen in Indonesian area. While, private space is a space of live in specific citizen with specific ethnic, members of specific religious, member of specific culture, etc. This article gives some main principal that need to organize in those spaces: in public space, private space and each private space.

Keywords: *multiculturalism, private space, public space*

A. Pendahuluan

Mengawali paparan ringkas sederhana ini, penulis ingin memandangi perlu mengemukakan beberapa pembatasan. **Pertama**, memperhatikan tema: “**Menata Kehidupan Majemuk Berbasis Multikulturalisme**”, tujuan kita adalah lebih berbobot praktis daripada sekedar teoretis. **Kedua**, kiranya kita bersepakat bahwa kehidupan majemuk yang akan ditata itu adalah kehidupan masyarakat Indonesia atau warga Negara Indonesia yang tersebar di dalam negeri dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua dan juga berdomisili di luar negeri. Dengan kata lain mengacu pada pengertian negara, kita terfokus kepada penataan kehidupan warga negara Indonesia, kehidupan penyelenggaraan negara Indonesia dan “kehidupan” lingkungan wilayah negara

Indonesia (di darat, laut, dan di udara) yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam pada itu juga, keterkaitan kehidupan di dalam negeri dengan luar negeri yang berlangsung semakin intens berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dunia usaha (bisnis), pariwisata, dan lain sebagainya. **Ketiga**, memperhatikan butir pertama dan kedua di atas, seyogianya kita fokus pada “multikulturalisme Indonesia” yang sesuai dengan kepentingan nasional dan identitas negara Indonesia. Hal ini perlu kita tegaskan, mengingat bahwa setiap negara mempunyai kepentingan nasional dan identitas masing-masing. **Keempat**, sedikit atau banyak dalam tulisan ini mengandung muatan lokal Sumatera Utara yang menjadi kancah FKPA-SU. Diharapkan hal ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau perbandingan untuk daerah-daerah lain bagi upaya kita

bersama secara nasional. Kelima, dengan memperhatikan pokok-pokok yang dikemukakan terdahulu, maka judul tulisan ini “Multikulturalisme dalam Bidang Sosial” dibatasi sebagai Multikulturalisme Indonesia dalam menata kehidupan majemuk masyarakat Indonesia dalam kerangka negara Indonesia, yaitu dalam perihal hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain di dalam negeri dan dengan pihak-pihak luar negeri.¹

Apakah tujuan penataan tersebut? ialah terwujudnya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang arif, lebih rukun, damai, selamat dan sejahtera, yaitu suatu masyarakat Indonesia yang multikultural dengan ciri-ciri positif sebagaimana akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

B. Apa dan Mengapa Multikulturalisme Perlu Dikembangkan di Indonesia?

Istilah “Multikulturalisme” tidaklah memadai dipahami secara harfiah sebagai “paham banyak budaya”. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.²

Gagasan multikulturalisme muncul pada beberapa negara yang penduduknya majemuk dari segi etnis, budaya dan agama, seperti misalnya di Amerika Serikat yang masyarakatnya lebih majemuk apabila dibandingkan dengan Indonesia. Sebelum muncul multikulturalisme, di Amerika Serikat pernah dikembangkan teori “Melting-Pot”

(tempat melebur) dan teori Salad-Bowl (tempat selada), namun keduanya mempunyai kelemahan dan mengalami kegagalan.

Dengan teori Melting-Pot diupayakan menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya masing-masing. Dengan teori Salad-Bowl, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Maka, Multikulturalisme mengoreksi kelemahan tersebut, antara lain dengan:

1. Membagi pergerakan budaya menjadi dua. Pertama, ruang publik yang terbuka bagi seluruh etnis untuk mengekspresikan dirinya dalam suatu tatanan budaya bersama. Kedua, ruang privat yang digunakan oleh masing-masing etnis mengekspresikan budayanya secara leluasa.
2. Mengembangkan kebanggaan sebagai satu bangsa dan satu negara.
3. Menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas.³

Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang multikulturalisme tersebut di atas dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan kebijakan inilah kita dapat memaknai “Bhinneka Tunggal Ika” secara baik, seimbang dan proporsional. Dengan kebijakan ini pula kita dapat menerapkan “Persatuan Indonesia” dan mengembangkan semangat nasionalisme sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya sesuai harapan bersama, dengan musyawarah mufakat kita dapat mengembangkan nilai-nilai dan budaya bersama sebagai budaya Indonesia yang luhur, yang dihayati dan menjadi kebanggaan bersama. Namun, dalam pada itu kita saling toleran dan menghargai terhadap budaya etnis

¹ Perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya dapat terjadi masalah-masalah sosial berkaitan atau berjaln dengan masalah-masalah ekonomi, politik, pendidikan, budaya, agama dan sebagainya.

² Lihat H.M. Atho” Muzhar, “Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke depan”, disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural, tanggal 14-16 maret 2005 di Ciloto, hal 14.

³ Lihat Dede Risyada, “Materi Kurikulum, Pendekatan, dan Metode Pendidikan Agama (Islam) Dalam Perspektif Multikultural”.

dan agama yang dianut oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air.

C. Arah Penataan Multikulturalisme pada Bidang Sosial di Negara Indonesia

Apabila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang ingin dikembangkan dengan multikulturalisme, maka sesuatu yang akan menjadi spesifik atau khusus adalah berkenaan dengan penataan ruang publik dan ruang privat tersebut adalah mengacu pada identitas kesepakatan dan dinamika yang berkembang di negara masing-masing, yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain, kecuali menyangkut “ruang publik antar-negara”, yang perlu ditata secara bersama pula, misalnya dalam PBB dan bentuk-bentuk ikatan antar-negara lainnya.

Sebagaimana lazimnya proses penataan hidup bersama yang baik, langkah yang terpenting adalah musyawarah untuk mencapai mufakat/kesepakatan. Selanjutnya seluruh warga/masyarakat yang hidup bersama tersebut melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan tersebut. Terhadap pelanggaran kesepakatan diberi sanksi sesuai dengan yang disepakati pula. Hal ini berlaku pada lingkup kecil (lokal), lingkup negara, maupun lingkup internasional. Demikian pula berlaku dalam penataan multikultural pada bidang sosial, baik menyangkut penataan ruang publik, maupun penataan ruang privat.

Sekedar gagasan tentang arah penataan multikultural pada bidang sosial di Indonesia dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

1. Penataan Ruang Publik

Bahwa ruang publik Indonesia adalah ruang lingkup bersama seluruh masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia. Telah banyak kesepakatan-kesepakatan yang bersifat mendasar, demikian pula penjabaran dan pelaksanaannya pada tingkat negara yang telah dihasilkan selama ini, antara lain:

- Pancasila
- Sumpah Pemuda
- Bhinneka Tunggal Ika

- Nilai-nilai universal dari ajaran suci agama yang dianut oleh rakyat Indonesia
- Nilai-nilai luhur bangsa yang diterima bersama
- Nilai-nilai kerukunan yang diterima bersama
- Perangkat peraturan perundang-undangan
- dan sebagainya

Semua kesepakatan-kesepakatan yang bermuatan positif tersebut perlu diupayakan agar senantiasa aktual mengisi ruang publik Indonesia. Dalam pada itu berbagai muatan negatif sedang aktual mengisi ruang publik Indonesia, perlu diupayakan untuk menyisihkannya atau meminimalisirnya, tentunya dengan cara-cara yang arif dan konstitusional/legal.

2. Penataan Ruang Privat

Ruang privat Indonesia adalah ruang hidup bersama masyarakat khusus, antara lain masyarakat etnis tertentu, umat beragama tertentu, masyarakat budaya tertentu dan sebagainya. Berbagai masyarakat khusus ini, lazim pula mengadakan musyawarah dan mufakat dan menghasilkan bentuk-bentuk penataan masyarakat masing-masing. Contohnya adalah adat istiadat dari masing-masing etnis, pola hidup jamaah di kalangan umat beragama dan lain-lain. Seluruh ruang privat tersebut, sejauh mempunyai makna sebagai kekayaan bangsa, dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditata dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi benturan antar-ruang privat, atau saling mendominasi ruang privat, atau berupaya mengintervensi ruang privat orang lain. Untuk inilah amat diperlukan pertemuan, dialog, silaturahmi, musyawarah antar-ruang privat, dalam arti antar-etnis, agama dan antar-budaya. Mudah-mudahan upaya-upaya ini telah semakin sering diadakan, termasuk di Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, berkat rasa kebersamaan dan partisipasi dari berbagai pihak, pertemuan silaturahmi dan dialog antar-agama setiap tahun diadakan beberapa kali, khusus oleh FKPA, bekerja sama dengan

pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kanwil Depag. Prov. Sumatera Utara dan unsur-unsur terkait lainnya. Lazimnya dalam setiap pertemuan tersebut diupayakan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk penataan hidup bersama, dalam “satu ruang privat” dan “antar-ruang privat” demikian pula dalam kerangka mengisi ruang publik dengan muatan-muatan yang bermakna. Selanjutnya sesuai teori “bola salju” kesepakatan-kesepakatan pada tingkat provinsi digulirkan ke kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hasil yang diperoleh tercermin dalam kondisi Sumatera Utara yang cukup kondusif, aman, tertib, rukun, dan damai.

D. Masalah dan Penanggulangan

Ada kekhawatiran dan kecemasan bahwa dominasi arus global saat ini yang cenderung negatif atau kurang mengindahkan nilai-nilai suci agama maupun nilai-nilai luhur ketimuran akan melanda berbagai tatanan kehidupan bernegara, termasuk Indonesia. Kekhawatiran dan kecemasan itu cukup

beralasan, dan telah terbukti dampak yang ditimbulkannya. Namun, bukanlah merupakan masalah yang mustahil untuk ditanggulangi.

Apa yang kita yakini, dan yang diyakini oleh umat yang menganut ajaran suci agama, segala dominasi yang bersifat negatif, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat hakiki, dan bertentangan dengan hati nurani manusia yang murni. Oleh karena itu bersifat sementara. Pada saatnya, hati nurani umat manusia memperoleh kekuatan spiritualnya yang murni, maka kecenderungan positif yang penuh makna akan menyinari dan mencerahkan perkembangan global.

Beranjak dari pandangan dan keyakinan ini, dan dengan berpegang teguh pada identitas dan kemandirian bangsa Indonesia, sesungguhnya berbagai permasalahan tersebut dapat ditanggulangi. Untuk itu, dan sekali lagi, syaratnya adalah semangat kebersamaan, musyawarah dan kesepakatan. Syarat ini tetap berlaku dalam menghadapi ancaman dari luar negeri, demikian pula dalam menyelesaikan semua “persoalan rumah tangga” di dalam negeri.

PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME :

Solusi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Sofyan Tan

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan

Abstract

This article focused on multiculturalism as the other alternative system besides of primordial education. Multicultural education can be used as a tool to eliminate the threat of the national disintegration. The phenomenon of this disintegration had been happened in some place in Indonesian region nowadays both horizontally and vertically conflict. The author begins his description of what YPSIM (Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, as educational institution established in Medan) had been doing in educational affair. This institution runs there acculturation program by the effort of making Chinese get closer with the indigenous people. The goals of these programs are to eliminate the stereotype and negative judgment among different ethnic and religious students. These programs also give the economic and politic advantages for each different ethnic group. How these things happen, clearly explained on this article.

Keywords: *multicultural education*

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, tigaratusan suku bangsa dan aneka budaya, agama, serta aliran kepercayaan telah menempatkan Indonesia sebagai negara besar di dunia dengan tingkat multikultural yang tinggi. Jika potensi yang sangat besar ini dapat dikelola secara baik akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini. Tetapi sebaliknya, jika kita lengah mengelolanya akan menghasilkan konflik bermuatan SARA yang akan membuat negara ini menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang memungkinkan negara ini terpecah-pecah menjadi ratusan negara baru.

Tanda-Tanda Ancaman Disintegrasi

1. Berbagai konflik yang muncul di daerah seperti Aceh, Poso, Maluku dan Papua yang pada awalnya akibat ketidakadilan secara ekonomi, namun akhirnya dibungkus dengan pertikaian beraroma SARA.

2. Sejak dilakukan sistem pemilihan kepada daerah secara langsung, untuk mencapai kemenangan para calon kepala daerah dan pendukungnya telah mempertontonkan pendidikan *primordial* kepada masyarakat. Hal ini merupakan bibit-bibit secara tidak langsung telah menanamkan permusuhan yang suatu saat bisa memicu konflik yang bernuansa SARA.
3. Pemekaran wilayah. Sejak diberlakukannya pemekaran wilayah banyak terbentuk kabupaten, kota maupun provinsi baru. Tuntutan pemekaran semakin hari semakin banyak dan kadangkala menimbulkan konflik antar-wilayah yang akan dimekarkan dengan pihak pemerintah daerah yang jika tidak ditangani secara hati-hati juga dapat memiliki potensi perpecahan bangsa ini.

Menilik tanda-tanda disintegrasi tersebut di atas dan untuk mencegah agar virus pendidikan *primordial* yang terjadi saat ini tidak menyebar dan tidak mengakibatkan

disintegrasi bangsa, maka salah satu jalan yang saya yakini dapat mengurangi dan memutus rantai ancaman disintegrasi yaitu melalui *Pendidikan Multikulturalisme* yang mengajarkan *pluralisme*. Di mana mereka diajarkan bahwa perbedaan kultur bukan merupakan musuh, tetapi merupakan kekuatan untuk membangun bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat, adil, makmur dan sejahtera.

II. YPSIM sebagai “Kendaraan” Integrasi

Pada tahun 1987 saya mendirikan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) Medan sebagai **kendaraan** untuk menuju integrasi bangsa sekaligus melahirkan generasi bangsa yang penuh toleransi dan dapat hidup berdampingan dalam perbedaan. Pada awalnya sekolah ini dirancang untuk mendekatkan dan mengatasi persoalan warga “asli” dengan etnis Tionghoa yang selama ini dianggap sulit berbaur dan merupakan “pekerjaan” yang harus diselesaikan.

Untuk memberikan gambaran bagaimana YPSIM menerapkan pendidikan multikultural, maka saya memberikan contoh model pendidikan yang kami lakukan di YPSIM, untuk menggempur prasangka negatif antara warga “asli” dengan etnis Tionghoa agar dapat hidup dengan penuh toleransi. Dan mungkin model pendidikan multikultural yang kami terapkan tersebut dapat dikembangkan dan dipertajam menjadi model pendidikan multikultural yang dapat diterapkan di negara ini.

Untuk mencapai tujuan integrasi dibutuhkan rekayasa program yang dapat mengeliminir prasangka-prasangka rasial yang muncul. Ada berbagai rekayasa program yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda.

1. Program Anak Asuh

Usaha menuju integrasi yang dilakukan di YPSIM selama ini salah satunya tercermin dalam program anak asuh yang dirintis sejak tahun 1989. Gerakan Orang Tua Asuh ini diterapkan dengan sistem berantai dan bersifat silang. Apa yang dimaksud dengan

sistem silang? orang tua asuh yang berasal dari warga etnis Tionghoa dianjurkan untuk mengambil anak asuh dari warga “asli”, sebaliknya orang tua asuh yang berasal dari warga “asli” mengambil anak asuh dari warga etnis Tionghoa.

Dan apabila anak asuh telah berhasil menyelesaikan studi mereka dan berhasil di masyarakat, mereka diharapkan dapat berperan sebagai orang tua asuh dengan mengambil anak asuh yang berbeda sukunya.

Dengan demikian, terjadi efek bola salju di mana setiap alumni YPSIM (khususnya para anak asuh) dapat menjadi pembaharu di tengah-tengah lingkungan mereka. Di sisi lain, dengan sistem silang semacam ini, maka anak asuh dan keluarga si anak asuh warga “asli” diharapkan menyadari kekeliruan persepsi mereka selama ini bahwa warga etnis Tionghoa ternyata tidak semuanya “pelit” atau tidak mau beramal. Sebaliknya anak asuh dan keluarga anak asuh yang warga etnis Tionghoa, menjadi sadar bahwa tidak semua warga “asli” itu jahat atau memusuhi mereka.

Melalui metode silang ini juga, ada keuntungan yang lain. Misalnya jika orang tua asuhnya kebetulan seorang pengusaha warga etnis Tionghoa, anak asuh yang telah lulus sekolah, bukan tidak mungkin mendapat pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan orang tua asuh tersebut. Keuntungan yang lain, si orang tua asuh akan memperoleh SDM yang tidak perlu diragukan lagi kesetiiaannya.

Di sisi lain, si anak asuh juga dapat mempelajari adat istiadat di orang tua asuhnya, termasuk belajar tentang keberhasilan ilmu dagangnya. Sedangkan, bagi anak asuh warga etnis Tionghoa yang mempunyai orang tua asuh warga “asli”, jika suatu waktu terjadi kerusuhan sosial maka Dia dan keluarganya akan terlindungi secara politis.

2. Komposisi Struktur Organisasi

Dalam aktivitasnya, YPSIM selalu berusaha agar nilai-nilai pembauran senantiasa diterapkan dan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga rasa kebersamaan dalam perbedaan tersebut tanpa disadari merekat erat dalam

setiap tindak tanduk baik para siswa, guru-guru, staf maupun pegawai. Hal ini tercermin dalam komposisi struktur di setiap unit sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru bimbingan penyuluhan (BP) adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka tanpa melihat latar belakang suku dan status sosial. Di sini terlihat bahwa mereka semua dapat bekerja sama meskipun berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda di antaranya: Aceh, Batak, Jawa, dan Tionghoa. Demikian pula halnya dengan para guru-guru, sebelum memasuki lingkungan YPSIM mereka terlebih dahulu harus menjalani proses seleksi yang cukup ketat, di antaranya tes psikologi dan wawancara. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan guru-guru yang berwawasan kebangsaan, guru-guru yang tidak memiliki prasangka antar-etnis dan agama. Hanya guru-guru yang seperti ini yang dapat menerapkan visi dan misi pembauran di dalam setiap kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

3. Pembangunan Tempat Ibadah dan Pendopo

Membangun tempat ibadah seperti Mesjid, Vihara, dan Gereja pada suatu lokasi dan saling berdampingan. Dengan demikian para siswa dapat melihat secara langsung teman-teman serta guru-guru mereka dari agama yang lain melakukan ibadah dan hal ini menciptakan rasa toleransi beragama dalam arti sebenarnya. Selanjutnya sebagai tempat mereka berkumpul dan berdiskusi ilmiah didirikanlah pendopo di antara ketiga rumah ibadah tersebut.

4. Manajemen Kelas

Dalam pengelolaan kelas, pengaturan tempat duduk diatur dengan cara berselang-seling antara etnis Tionghoa dengan warga "asli". Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses interaksi yang intensif antara etnis yang berbeda. Sedangkan dalam komposisi kepengurusan OSIS juga melibatkan siswa dari berbagai unsur etnis.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

Agar terjadi kontak fisik yang alamiah dan melahirkan pemahaman yang baik antar-sesama, maka diadakanlah berbagai kegiatan yang berorientasi kelompok. Di mana tanpa disadari, kegiatan tersebut melibatkan berbagai etnis seperti dalam pembentukan tim bola basket, bola volley, pentas drama, *vocal group*, *cheer leader*, pramuka, dan sebagainya.

6. Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan hidup berupa "*out door activities*" yang dikaitkan dengan penyadaran bahwa sesungguhnya alam juga tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap apapun. Pohon di hutan yang senantiasa menghasilkan oksigen yang sama banyaknya untuk dihirup oleh manusia dan hewan tanpa ada batasan dan diskriminasi. Lalu mengapa manusia yang memiliki akal budi tidak melakukan hal yang sama – memberi dan membantu tanpa ada diskriminasi dan pembedaan antara satu dengan lainnya.

III. Program ke Depan

Usaha YPSIM menuju integrasi bangsa masih belum selesai. Untuk ke depan, YPSIM telah mempunyai rancangan membangun rumah yatim piatu, rumah jompo, dan rumah sehat. Anak-anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu akan berbaur dengan para orang tua jompo yang umumnya datang dari keluarga berada. Sehingga, anak-anak yang kehilangan orang tua akan tetap merasakan kasih sayang dari orang tua yang tinggal di rumah jompo. Sedangkan orang tua jompo yang tinggal di sana nanti akan mengambil anak-anak yatim piatu tersebut sebagai anak asuh mereka sekaligus dapat mengisi kekosongan hati karena jauh dari keluarga. Mereka juga akan memiliki keluarga baru bersama anak-anak asuh mereka.

IV. Penutup

Integrasi yang sebelumnya hanya bertujuan untuk menghilangkan prasangka

antar-etnis Tionghoa dengan warga “asli” pada akhirnya berkembang menjadi satu lembaga institusi yang tidak hanya berfokus pada integrasi antar-kedua etnis di atas. Namun telah merangkum berbagai etnis dan agama serta mengeliminir prasangka antara si kaya dengan si miskin. Dengan demikian, YPSIM dapat mengambil peran sebagai “kendaraan

integrasi” bagi penyelesaian konflik sosial bernuansa SARA yang terjadi di berbagai belahan bumi pertiwi ini. Tidaklah berlebihan jika Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda senantiasa memegang erat semboyan **“Mendukung Keberagaman Bukan Keseragaman”**.

MULTIKULTURALISME: Dari Lingkup Keluarga Hingga Media Massa

Robert Valentino Tarigan

Yayasan Bela Bumi/Bimbingan Studi BIMA

Abstract

This article discuss about the urgent of multiculturalism education based on family and mass media. The author starts this article with multiculturalism education that properly seeded and increase in nuclear family and extended family. The seedling of mutual respect attitude from family environment will spread to a community and will move to education institution that begins from kindergarten up to university. His argumentation of the spirit of multiculturalism in the mass media is connected with the effort of enforcement and maintaining the freedom of press. The spirit of multiculturalism could only grow up in the circumstance of the freedom of press.

Keywords: *household, mass media*

Pendahuluan

Suatu hari, seorang ayah mengajak anak-anak serta istrinya menikmati taman kota. Di taman itu, ada yang berjualan kacang goreng, kacang rebus, jagung bakar, kerupuk jangek, dan sebagainya. Ketika pedagang-pedagang menawarkan dagangannya kepada keluarga tersebut, si ayah menanyakan kepada anaknya yang tiga orang tersebut, mau jajan apa, mereka bebas memilih. Si A memilih kacang rebus, sementara si B memilih jagung bakar, sementara si C maunya kerupuk jangek. Sedangkan si Ibu membeli rujak. Si ayah sendiri memilih kacang goreng.

Sikap si ayah yang tidak mematok harus jajan ini, atau jajan itu, adalah merupakan bagian dari semangat pluralisme, mendidik anggota keluarga untuk bebas menentukan pilihannya. Sebab sesungguhnya, setiap pribadi mempunyai keinginan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sikap seperti ini, jika terus-menerus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga akan mampu menumbuhkan multikulturalisme di tengah-tengah masyarakat.

Seperti bunga-bunga di taman, justru karena ia beraneka warna akan terlihat semakin indah. Demikianlah kehidupan kita sesungguhnya, diwarnai dengan keanekaragaman suku-bangsa. Cara si ayah memperlakukan anak-anak dan istrinya bebas menentukan apa yang diinginkan merupakan pendidikan yang bernuansa pluralisme dan sangat efektif membangun peradaban, hidup bersama dalam keberagaman yang bahasa kerennya multikulturalisme. Mengapa efektif, sebab dirasakan langsung oleh masing-masing anggota keluarga.

Rumah adalah Sekolah yang Pertama

Bukankah pepatah Arab mengatakan *al-bait madrasatul u'la* yang artinya *rumah adalah sekolah yang pertama*. Tambahan lagi, pada budaya paternalistik, patron ayah sangat dominan dalam keluarga. Artinya, ketika ayah melakukan sesuatu, niscaya anggota keluarga akan mengikutinya. Sikap si ayah yang memberikan kebebasan memilih, jika terus-menerus diterapkan dalam kehidupan akan menjadi budaya (kultur) keluarga itu. Andai pula sikap ini ditularkan kepada keluarga-

keluarga lain dan handai tolan, niscaya akan membangun komunitas yang saling menghargai perbedaan masing-masing.

Demikianlah, setelah memasuki gerbang sekolah yang sesungguhnya, kenyataan bahwa kita di Indonesia memiliki sedikitnya 356 suku-bangsa, adalah hal yang harus terpelihara serta ditumbuhkembangkan. Bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia memiliki warna kulit, bahasa ibu, dan budaya yang berbeda-beda. Apalagi antara Batak Toba dengan Batak Karo, misalnya.

Perbedaan-perbedaan ini pada satu sisi merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi di sisi lain, jika kita saling tidak mau mengerti, merupakan ancaman konflik yang siap meledak kapan dan di mana saja. Justru itu, dunia pendidikan dari lingkungan keluarga hingga perguruan tinggi tidak boleh abai terhadap persoalan yang sesungguhnya sangat *urgent* bagi bangsa ini.

Sebab, institusi-institusi pendidikan formal dari TK hingga PT, nonformal, dan informal merupakan tempat berkumpulnya beragam suku-bangsa, agama, keyakinan, dan budaya. Ketika terjadi pergesekan yang berbau SARA, para guru dan *stakeholders* lainnya haruslah secara cepat dan tepat mengambil langkah penyelesaian. Selanjutnya, pers (media massa) sebagai salah satu lembaga pembentuk opini publik pun tak boleh tinggal diam atau malah jadi penyulut.

Bila konflik SARA seperti beberapa peristiwa yang pernah terjadi di wilayah Indonesia Bagian Timur, pers mestinya menjadi pemadam kebakaran. Bukan sebaliknya, malah justru meniup-niup bara sehingga menjadi api yang dapat membakar siapa saja.

Di wilayah yang dua kekuatan agama atau etnis berbeda mendominasi dan berimbang, akan sangat mudah tersulut api permusuhan. Hal ini dapat terjadi apabila pers (media massa) “meniup-niup” bara perbedaan untuk memunculkan permusuhan. Alasan mengembangkan tiras (oplah) dari pihak pers, hendaknya jangan sampai merusak tatanan kerukunan hidup yang telah terbina sebelumnya.

Perbedaan di antara kita sesama manusia yang merupakan kodrat duniawi sudah selayaknya harus dibicarakan, bahkan dipelajari sehingga tumbuh pemahaman untuk saling menghargai. Hanya saja, jika perbedaan itu dibicarakan dan dipelajari dengan tujuan untuk saling mempertentangkan atau memojokkan kelompok lain, maka hal inilah yang merupakan bahaya laten, terutama jika mengobarkan konflik yang berbau SARA misalnya. Sesungguhnya aturan main dalam dunia pers telah diatur dalam undang-undang serta KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Jika masing-masing pihak memahami aturan ini, maka pers dapat memainkan peran positif dalam kesadaran akan perbedaan. Bahkan pers dapat memainkan peran untuk menghindari terjadinya tiranisme ataupun anarkisme di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan kebebasan berbicara atau kebebasan pers ini, John G Riefenbaker pernah mengemukakan bahwa kebebasan adalah hak untuk keliru, tapi bukan hak untuk berbuat salah. Artinya, kalau keliru adalah merupakan faktor ketidaksengajaan. Kalau sengaja untuk berbuat salah yang targetnya hanya untuk merusak citra seseorang, itu sama saja dengan tiranisme atau anarkisme. Ini pun harus dilawan oleh siapa saja, termasuk oleh pers sendiri.

Menggunakan UU No. 40

Jika orang-orang pers dan kita semua tidak menjadikan hukum sebagai panglima, maka inilah dasar bagi orang-orang tertentu untuk kembali mengontrol kebebasan pers. Perlu kita cermati bersama bahwasanya telah ada UU No 40 Tahun 1999 yang dapat diterapkan dalam menindaklanjuti kasus-kasus penyalahgunaan kebebasan atau delik pers.

Sebenarnya, siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa dapat menggunakan haknya. Oleh undang-undang, pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak jawab atau mengadukan ke polisi. Bahkan, jika pihak yang dirugikan telah menggunakan hak jawabnya, manakala dia masih kurang puas,

maka yang bersangkutan dapat menindaklanjutinya dengan memproses pengaduan ke pihak kepolisian. Tanpa atau dengan menggunakan hak jawab, si korban tetap boleh berproses ke polisi.

Pasal 18 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: "*perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 Ayat 1 dan 2 serta pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal 5 ayat 1: pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah. Ayat 2: pers wajib melayani hak jawab.*"

Ke Lembah Tiranisme

Pers adalah salah satu pilar penegakan demokrasi yang merupakan fundamen bagi tumbuh suburnya semangat multikulturalisme. Karena itu, fungsinya tidak boleh dihambat oleh kekuatan apapun. Jika pers salah, tidak perlu dilakukan teror atau intimidasi. Ajukan saja ke pengadilan. Dasar hukum yang dipakai untuk menyidangkannya pun haruslah UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, tidak boleh yang lain. Ini sesuai dengan prinsip hukum kita: *lex specialist derogat lex generalist* yang artinya *jika ada hukum khusus, tidak boleh dipakai hukum umum*.

Apabila pers dihambat, kita sangat yakin bangsa yang tertatih-tatih dalam menegakkan demokrasi ini akan semakin tersungkur ke lembah tiranisme. Sudah sama kita rasakan betapa usai tiranisme eksekusif, kita harus berhadapan lagi dengan tiranisme legislatif (tentang ini dapat dibaca tulisan Leo

Batubara di surat-surat kabar terbitan September 2003). Karena itu pula, tanpa kebebasan pers, kita tidak akan mungkin dapat menumbuh-suburkan multikulturalisme apalagi mencapai tujuan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945: keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekali lagi, hukum harus ditegakkan. Jika hukum dibuat dan dijalankan hanya untuk melindungi penguasa atau pengusaha cepat atau lambat bangsa ini pun akan tenggelam ke dalam rawa-rawa sejarah. Sejarah sudah membuktikan, hegemoni yang dilakukan orde baru terhadap lembaga-lembaga yang ada, tidak mungkin runtuh, jika-ketika itu pers tidak berbuat. Oleh karena itu, ketika pers dalam bahaya, kita semua berkewajiban atau bahkan harus berusaha untuk menyelamatkannya. Sebab, jika pers tidak punya lagi kebebasan, bagaimana mungkin akan menumbuh-suburkan multikulturalisme yang merupakan kenyataan riil dari kehidupan di dunia ini.

Sehebat apapun dunia pendidikan membawa semangat multikulturalisme, jika persnya terbelenggu, niscaya gaungnya hanya sayup-sayup sampai. Bahkan pers secara tidak proporsional mengekspos konflik SARA, maka multikulturalisme yang telah ditumbuh-suburkan lembaga-lembaga pendidikan dan lainnya yang ada di tengah masyarakat dapat saja hancur berantakan.

- BIODATA PENULIS -

AHMAD FEDYANI SAIFUDDIN, adalah pengajar pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau mencapai gelar Sarjana Antropologi (1982) dari Universitas Indonesia, MA (1985) dan PhD (1992) dalam bidang antropologi dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menulis buku *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, diterbitkan oleh Prenada Media (2005).

AHMAD RIVAI HARAHAHAP, adalah pengajar tetap di IAIN Sumut. Beliau aktif sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama (FKPA) Sumatera Utara yang mengembangkan dialog-dialog antar-pemuka agama untuk membangun toleransi dan keharmonisan kehidupan antar-umat beragama. Beliau juga menjadi Ketua Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) Indonesia, Perwakilan Medan Sumatera Utara.

IRWAN ABDULLAH, lulus S1 Antropologi dari UGM (1987) dan memperoleh PhD dalam bidang antropologi dari University of Amsterdam (1994). Menjadi pengajar tetap pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

MEUTIA F. HATTA, adalah guru besar dan pengajar tetap di Departemen Antropologi Fisip UI. Memperoleh pendidikan S1 dari UI tahun 1974, S2 tamat tahun 1983 dan mendapat gelar doktor dari Universitas Indonesia tahun 1991. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Antropologi UI tahun 1999, juga Ketua Departemen Antropologi Fisip UI. Saat ini menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu.

NUR A. FADHIL LUBIS, adalah guru besar dan pengajar tetap di IAIN Sumatera Utara. Beliau menamatkan pendidikan MA dan PhD dari University of Los Angeles, California, USA. Kini menjabat sebagai Ketua Program S3/Doktor Hukum Islam di IAIN Sumut Medan, juga dosen pada PPS UNIMED Medan, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Susqa Pekanbaru. Beliau juga sekarang ini menjadi pengurus YPPIA Medan.

ROBERT VALENTINO TARIGAN, memiliki pendidikan dokter dan sarjana pendidikan. Merupakan pendiri lembaga pendidikan BT/BS BIMA yang berpusat di Medan. Saat ini juga aktif di bidang LSM lingkungan dan menjabat sebagai Direktur LSM Pelindung Bumimu.

SOFYAN TAN, juga adalah seorang dokter yang tidak berpraktik. Beliau banyak bergerak di dunia bisnis, menjadi pendiri Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Aktif dalam dialog-dialog kebudayaan dan menjadi pembicara dalam sejumlah seminar dan lokakarya.